

**PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI
MASA PANDEMI COVID-19 DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PROTOKOL
KESEHATAN DI KABUPATEN PEMALANG**



SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

ROSISKA CHAERUNISA HERBANI

NPM 5117500052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PROTOKOL KESEHATAN DI
KABUPATEN PEMALANG**

**Rosiska Chaerunisa Herbani
NPM.5117500052**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, Januari 2021

Pembimbing I



Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H
NIDN. 0613035701

Pembimbing II



Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN.0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PROTOKOL KESEHATAN DI
KABUPATEN PEMALANG**

Rosiska Chaerunisa Herbani
NPM.5117500052

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 28 Januari 2021

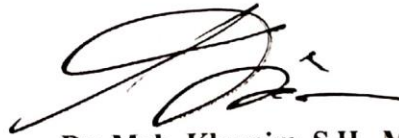
Penguji I

2



H. Toni Haryadi, S.H., M.H.
NIDN. 0020045801

Penguji II



Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H.
NIDN. 0617026101

Pembimbing I



Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 0613035701

Pembimbing II



Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Mengetahui
Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosiska Chaerunisa Herbani
NPM : 5117500052
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 17 Oktober 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI
MASA PANDEMI COVID-19 DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PROTOKOL
KESEHATAN DI KABUPATEN PEMALANG**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 28 Januari 2021

Yang menyatakan,



(Rosiska Chaerunisa Herbani)

Abstrak

Pilkada Serentak tahun ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dalam pelaksanaan Pilkada tersebut banyak mengalami perubahan yang sifat dan eksistensinya berbeda dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 yang pelaksanaannya diatur pada PKPU Nomor 14 Tahun 2015. Oleh karena itu, KPU RI menerbitkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dan telah menyisipkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui tentang pelaksanaan Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan. (2) Mengkaji dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pemalang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, teknik pengumpulan datanya melalui pengolahan data kepustakaan, pengumpulan data secara daring, dan wawancara dianalisis dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak meskipun dalam peraturan KPU sudah mengatur tentang pedoman protokol kesehatan pengendalian dan pencegahan Covid-19 masih banyak pelanggaran yang dilakukan, Didalam PKPU mengatur tentang sanksi yang kurang tegas sehingga masih banyak terjadi pelanggaran, diharapkan sanksi yang diberikan membuat efek jera. Apabila pelanggaran protokol kesehatan ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, jika ada yang tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan akan diberikan sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 93 Undang-Undang kekarantinaan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Pilkada Serentak, COVID-19, Dampak Pilkada.

Abstract

This year's Regional Elections Simultaneously will be held on December 9, 2020. In the implementation of the regional elections, many changes in nature and existence are different from the implementation of concurrent elections in 2015 whose implementation is regulated in PKPU Number 14 Of 2015. Therefore, KPU RI issued PKPU Number 13 Of 2020 and has inserted health protocols in the implementation of regional elections simultaneously.

This study aims to: (1) Know about the implementation of simultaneous elections during the Covid-19 pandemic according to Law Number 6 Of 2018 on Quarantine. (2) Review the impact that will be caused from the implementation of simultaneous elections during the Covid-19 pandemic in Pemalang Regency.

This type of research is literature research, the approach used is normative-empirical, data collection techniques through the processing of literature data, online data collection, and interviews are analyzed in qualitative ways.

The results of this study showed that the implementation of the Regional Elections Simultaneously although in the regulation of the KPU has set about the guidelines of health protocols for control and prevention of Covid-19 there are still many violations committed, in the PKPU regulates about sanctions that are less assertive so that there are still many violations, it is expected that the sanctions given make a deterrent effect. If the violation of this health protocol is related to Law Number 6 Of 2018 on Health Quarantine, if anyone does not comply with and or obstructs the implementation of health quarantine will be given criminal sanctions contained in Article 93 of the Health Quarantine Act.

Based on the results of this research is expected to be a material of information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.

Keywords : Simultaneous Regional Elections, COVID-19, The Simultaneous Regional Elections.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu sebagai inspirasi dalam hidupku yang selalu mendukung dari segi moril atau material.
- Saudara-saudara yang selalu memberiku dukungan dan doanya.
- Teman-teman yang selalu memberikan semangat serta dukungan.

MOTTO

“Disiplin diri sama dengan kontrol diri. Kemampuanmu untuk mengendalikan diri dan tindakanmu, mengendalikan apa yang kamu katakan dan lakukan, dan memastikan bahwa konsisten dengan tujuan dan sasaran jangka panjang adalah tanda orang yang unggul”

(Brian Tracy)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Univeritas Pancasakti Tegal).
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeritas Pancasakti Tegal).
4. H. Toni Haryadi, S.H.,M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univeritas Pancasakti Tegal).
5. Imam Asmarudin, S.H.,M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeritas Pancasakti Tegal).
6. Tiyas Vika Widyastuti, S.H.,M.H. (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Pancasakti Tegal).

7. Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H.,M.H. (Dosen Pembimbing I), Dr. Ratna Riyanti, S.H.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. Membalas semual amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 28 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Konstitusi	14
1. Konstitusi di Indonesia.....	14
2. Konstitusi Pemilihan Umum	17
B. Tinjauan Umum tentang Demokrasi.....	21
1. Pengertian Demokrasi	21
2. Demokrasi di Indonesia	24
C. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum di Indonesia	27
D. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Kepala Daerah	29

1. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah	29
2. Pemilihan Kepala Daerah Serentak	35
E. Tinjauan Umum tentang KPU	37
F. Tinjauan Umum tentang <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)	39
BAB III HASIL PENELITIAN	43
A. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	43
1. Penyusunan Daftar Pemilih.....	45
2. Pencalonan dan Penetapan Bakal Pasangan Calon	48
3. Masa Kampanye	50
4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	54
B. Dampak dari Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pematang Jaya.....	63
BAB IV PENUTUP	68
1. Simpulan	68
2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2020.....	45
2. Jumlah Pemilih Dalam DPT Kabupaten Pemalang	46
3. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	46
4. Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar Dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	47
5. Jumlah Pemilih Kabupaten Pemalang Tahun 2020	48
6. Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020	49
7. Data Kampanye dan/Kegiatan Lainnya	51
8. Data Pencegahan Pelanggaran Protokol Kesehatan.....	51
9. Data Pengguna Hak Pilih	56
10. Data Perolehan Suara	56
11. Data Pantauan Covid-19 di Kabupaten Pemalang Bulan Juni-Desember 2020	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik (*res publica*) artinya adalah kepentingan umum. Pemerintahan republik adalah bentuk pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) dan dipimpin oleh presiden untuk masa jabatan tertentu. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem pemerintahan dimana seorang presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (eksekutif). Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden.¹ Presiden dan wakil presiden dipilih rakyat secara langsung melalui pemilu dan masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.²

Montesquieu dalam bukunya *L'esprit des lois (The Spirit of Laws)* mengembangkan teori pemisahan kekuasaan melalui ajaran *Trias Politica* Montesquieu. Teori Trias Politika adalah teori yang menerapkan pembagian kekuasaan pemerintah negara menjadi tiga, yaitu legislatif,

¹ Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001, hlm. 74.

² Ari Welianto (*ed*) , “Sistem Presidensial, Sistem Pemerintahan di Indonesia”, Kompas, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/02/05/160000869/sistem-presidensial-sistem-pemerintah-di-indonesia>, Jakarta, 5 Februari, 2020.

kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.³ Pemisahan dan pembagian kekuasaan yang dianut oleh Indonesia terdapat di UUD NRI 1945 selaku landasan konstitusi utama, pembagian kekuasaan merupakan konsekuensi dari diberlakukannya sistem demokrasi.

Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem politik demokrasi dalam proses pemerintahannya, demokrasi diartikan sebagai kekuasaan oleh rakyat. Teori kedaulatan rakyat pada pokoknya terkait dengan prinsip prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi (*democratie*).⁴

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani '*demos*' yang berarti rakyat dan '*kratos*' atau '*cratein*' yang berarti kekuasaan.⁵ Negara dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi disebut dengan negara demokrasi, dan digambarkan dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*from the people, of the people, for the people*).⁶

Pelaksanaan pilkada merupakan bentuk dari pemerintahan demokrasi, agar dapat terwujudnya pemerintah yang demokratis. Demokrasi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat apabila diselenggarakan secara langsung pemilihan umum, guna menentukan kandidat pemimpin yang layak untuk memegang kekuasaan pemerintahan. Dengan diadakannya pemilihan kepala daerah atau biasa disebut Pilkada,

³ Montesquieu, *The Spirit of Law, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Bandung: Nusa Media, 2007.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.132.

⁵ Suyatno, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta.

⁶ Bagir Magnar & Kuntana Magnar, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 56.

merupakan salah satu bentuk pemberian jaminan kebebasan warga negara melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat daerah sebagai sebuah bentuk partisipasi publik secara luas karena sebagai sarana kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.⁷

Pemilihan umum kepala daerah adalah pemilihan umum yang dilaksanakan di tingkat daerah guna memilih pemimpin daerah. Menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kepala dan wakil kepala daerah dipilih oleh rakyat di daerah itu sendiri secara langsung melalui pilkada. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bebas dan berkala prasyarat sistem politik demokrasi, pemerintah demokrasi wajib melaksanakan pilkada dalam waktu yang sudah ditentukan.⁸

Menurut pendapat Mahfud MD, pelaksanaan pemilihan secara langsung dianggap perlu di daerah, karena dapat membuka peluang calon kepala daerah atau calon pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat, serta menjaga stabilitas agar pemerintahan tidak dijatuhkan oleh parlemen.⁹

Tahun 2020 merupakan gelombang keempat pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia, sebelumnya pemerintah dan DPR telah menyetujui

⁷ Janpatar Simamora, Eksistensi Pilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis, *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Februari, 2011, hlm. 1-2.

⁸ Serafica Gischa (ed), "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Demokrasi Pancasila", Kompas <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/09/04/133046169/pemilihan-umum-sebagai-wujud-demokrasi-pancasila>, Jakarta, 4 September, 2020.

⁹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007, hlm. 133-135.

pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020, namun pemerintah memutuskan untuk menunda pelaksanaan pilkada yaitu pada tanggal 9 Desember 2020 akibat adanya pandemi global *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).¹⁰ Keputusan tersebut sudah mendapatkan saran dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Perppu Nomor 2 Tahun 2020) sebagai dasar hukum atas ditundanya pelaksanaan Pilkada yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.¹¹

Corona Virus Disease (Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona berjenis Sars-CoV-2, yang kasusnya ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan

¹⁰Eko Sulistyono, "Pilkada di Tengah Pandemi", Berita Satu <https://www.beritasatu.com/archive/opini/6923/pilkada-di-tengah-pandemi>, Jakarta, 15 Juni, 2020.

¹¹Achmadudin Rajabi, *Analisis Kekurangan Perpu No. 2 Tahun 2020 Dari Sisi UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 15 Tahun 2019*, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2020.

semakin meluas ke seluruh dunia. Begitu pula di Indonesia, kondisi saat ini penyebaran virus di Indonesia meningkat secara signifikan, sehingga mengalami beberapa dampak seperti masyarakat mengalami penderitaan dan keterpurukan. Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Corona menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19 serta menerbitkan protokol kesehatan, dan diterapkan di wilayah Indonesia oleh warga masyarakat serta pemerintah dengan mengikuti petunjuk dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.¹²

Penetapan tanggal pilkada serentak menjadi hal yang sangat penting di tengah situasi sulit akibat Covid-19, mengingat pandemi masih belum dapat terkendali bahkan semakin bertambah setiap harinya. Berdasarkan data yang ada jumlah penderita dan angka kematian di Indonesia akibat virus ini masih sangat tinggi.¹³ Dalam situasi genting seperti ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab menyelenggarakan harus mampu menerapkan dan memberikan petunjuk tentang tahapan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan dan mitigasi resiko untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat akan tertular virus Covid-19 dan akan menyebabkan masyarakat enggan untuk memilih.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini memiliki banyak perubahan dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015

¹² Dalinama Telaumbanua, *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Volume 12, 2020, hlm. 59.

¹³ Bivitri Susanti, S.H., LL.M, "Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Haruskah Tetap Dilaksanakan?" , <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5efc763f109f2/pilkada-si-tengah-pandemi-covid-19-haruskah-tetap-dilaksanakan-> Jakarta, 1 Juli, 2020.

yang pelaksanaannya diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, kemudian telah mengalami penyempurnaan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Perkembangan virus Covid-19 di Indonesia masih belum mengalami penurunan dan belum adanya vaksin yang menyeluruh yang diberikan kepada masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tidak sesuai dengan keadaan genting yang saat ini telah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, KPU Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19.

Di dalam PKPU tersebut telah diatur mengenai protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 guna mencegah meluasnya penyebaran virus Covid-19. Maka dari itu dalam penelitian ini

akan dibahas mengenai pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 dalam hubungannya dengan protokol kesehatan, dan apa dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pemalang pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020, serta hasil dari terlaksananya pilkada di Kabupaten Pemalang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan peneliti angkat berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan?
2. Apa dampak dari pelaksanaan Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan tujuan dilaksanakan penelitian. Uraian dari tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui tentang pelaksanaan Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
2. Mengkaji dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mendapatkan masukan dalam berpikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya mengenai Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan saran bagi berbagai kalangan seperti para akademisi dan praktisi masyarakat untuk menunjang penelitian selanjutnya yang akan digunakan sebagai bahan perbandingan penelitian lain.

E. Tinjauan Pustaka

Sumber-sumber yang peneliti gunakan sebagai acuan penelitian ini yaitu :

1. Muhammad Andi Susilawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, dalam jurnal Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 2, April-Juni 2014. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dimana ada kelebihan dan kelemahan dari dilaksanakannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung tersebut.

2. Janpatar Simamora, *Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis*, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, 2011. Penelitian ini mengkaji tentang Pemilukada yang dilaksanakan secara langsung guna merealisasikan kedaulatan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya melalui banyak persoalan dan tantangan yang merupakan suatu proses pematangan dalam rangka mewujudkan pemerintah demokratis.
3. Teten Jamaludin, *Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika*, dalam Jurnal Politik Walisongo, Volume 1, Nomor 1, 2019. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Pilkada merupakan buah dari reformasi, dimana masyarakat bisa menentukan sendiri kepala daerahnya sesuai dengan aspirasinya. Mekanisme pemilihan kepala daerah ini mengalami pro dan kontra antara langsung dan tidak langsung. Hal tersebut mengingat dari dampak positif dan negatifnya dari mekanisme tersebut.

Berdasarkan sumber rujukan yang telah dicantumkan terdapat perbedaan antara penelitian dan rujukan yaitu peneliti membahas dan mengkaji mengenai pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pematang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan menggunakan studi penelusuran kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.¹⁴ Melalui penelitian ini dikaji secara mendalam tentang pelaksanaan Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 dalam hubungannya dengan protokol kesehatan, dan apa dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pematang Jaya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan normatif-empiris (*applied law research*), yaitu merupakan suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.¹⁵

3. Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia, 2015, hlm. 213.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm 52.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya memiliki kewenangan.¹⁶ Penulis mengambil dari informasi dan studi pustaka yang terkait dengan penelitian ini dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum dan literatur-literatur yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties*; artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat dikoran atau majalah populer serta wawancara.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk membantu penelitian ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Metode pengumpulan data yang diperlukan adalah menggunakan :

- (1) Teknik pengumpulan dan pengolahan data kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam suatu media, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁷ I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet.ke-2, hlm 154.

¹⁸ Sarwono,J., *Pintar Menulis Karangan Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010, hlm. 173.

- (2) Teknik pengumpulan data secara daring (online) yaitu dengan mengutip sumber-sumber dari website yang membahas mengenai penelitian.
- (3) Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan cara tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu teknik analisis yang menggunakan proses berfikir induktif dan digunakan untuk menguji teknik hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap yang diteliti.¹⁹ Dalam hal ini penulis mengkaji permasalahan yang timbul melalui hipotesis-hipotesis dalam menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian ini akan disusun dalam 4 bagian bab tahapan dalam penulisan, yaitu :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Rencana Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual, menguraikan tentang Pengertian. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian, gambaran umum

¹⁹ U Rianse Abdi, *Metodologi Sosial dan Ekonomi*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 30.

mengenai pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia, serta gambaran umum tentang Covid-19.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil rumusan masalah sesuai dengan permasalahan yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan apa dampak dari pelaksanaan Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pematang Jaya.

Bab IV Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan umum tentang Konstitusi

1. Konstitusi di Indonesia

Konstitusi menurut pendapat Wirjono Projodikoro, berasal dari bahasa Perancis yaitu '*constituer*' yang memiliki arti membentuk. Jadi yang dimaksud dengan konstitusi adalah pembentukan negara dan penyusunan negara hingga dapat dinyatakan sebagai negara.²⁰ Sedangkan konstitusi menurut Rukmana Amanwinata sepadan dengan beberapa istilah seperti '*constitution*' dalam bahasa Inggris '*constitutie*' dalam bahasa Belanda, '*constitutional*' dalam bahasa Perancis '*verfassung*' dalam bahasa Jerman, dann '*constitution*' dalam bahasa Latin.²¹ Dalam pembentukan suatu negara, konstitusi merupakan permulaan dari segala macam peraturan pokok yang akan menjadi pondasi utama untuk membentuk suatu negara.²²

Istilah Undang Undang Dasar berasal dari kata '*Grondwet*' merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yang artinya '*wet*' adalah undang-undang sedangkan '*grond*' memiliki arti tanah atau dasar.

Pengertian konstitusi dalam praktiknya memiliki arti yang lebih luas dari

²⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian rakyat, hlm. 10.

²¹ Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, Bandung: Disertasi Universitas Padjajaran, hlm.48.

²² C.A.J.M. Kortmann, *Constitutionalrecht, dalam Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi- proses dan prosedur perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2004, hlm. 29.

sekedar pengertian Undang-Undang Dasar, namun ada beberapa ahli kenegaraan yang berpendapat bahwa pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar itu sama. Konstitusi menurut para sarjana politik memiliki arti luas yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintahan di suatu negara dan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.²³

Pengertian konstitusi menurut pendapat Kenneth Clinton Wheare, konstitusi dapat berarti secara luas dan juga secara sempit . Dalam artian luas menurut pandangan politik, konstitusi digambarkan dengan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, peraturan-peraturan di suatu negara ada yang memiliki sifat legal dan ada juga yang bersifat ekstra-legal yang biasanya berupa kebiasaan, persetujuan atau konvensi. Sedangkan secara sempit memiliki arti sebagai kumpulan peraturan baik legal maupun non-legal, yang kemudian di seleksi dan biasanya berbentuk satu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang saling berkaitan secara erat.²⁴

Konstitusi dapat memiliki arti tentang prinsip yang mengatur tentang kekuasaan oleh pemerintah, kemudian hak-hak warga negara, dan hubungan antara rakyat dan pemerintahan. Konstitusi dapat berupa catatan tertulis, dokumen yang dapat diubah sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan perkembangan teknologi, dan atau hukum yang terpisah dan memiliki kewenangan khusus sebagai hukum konstitusi. Konstitusi juga dapat

²³ Dahlan Thaib, *et al.*, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan ke-4, hlm. 7.

²⁴ K.C.Wheare, *Modern Constitutions*, London-New York-Toronto: Oxford University Press, hlm. 1-2.

ditetapkan dalam suatu undang-undang dan bergantung pada otoritas adat istiadat dan kebiasaan warga setempat.²⁵

Negara yang menganut demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar sendiri berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak ada kekuasaan yang memiliki sifat sewenang-wenang. Dengan dilakukannya pembatasan kekuasaan pemerintah berharap dapat melindungi hak-hak warga negara, gagasan tersebut dinamakan konstitualisme.²⁶ Cara permbatasan yang paling efektif adalah dengan pembagian kekuasaan, pembatasan ini tercerrmin dalam UUD NRI 1945 atau konstitusi. Jadi dalam hal ini konstitusi merupakan perwujudan dari hukum yang tertinggi (*Supermation of law*) yang harus ditaati oleh rakyat dan pemerintah dan bahkan penguasa sekalipun.²⁷

Indonesia memiliki konstitusi untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya diganti dengan Konstitusi RIS Tahun 1949 dan beralih ke UUDS Tahun 1950 dan kemudian diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sejak itu UUD NRI Tahun 1945 diberlakukan kembali dengan adanya perubahan pada tahun 1999. UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan yang bertahap pada tahun 1999 hingga 2002. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Secara historis yang diartikan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diinginkan oleh yang mendirikan

²⁵ C. F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Competitive Study of Their History and Existing From*, SPA Teamwork, *Konstitusi Konstitusi Politik Modern*, Bandung : Nuansa dan Media, Cetakan 1, 2004, hlm. 15.

²⁶ *Ibid*, hlm 19.

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, hlm. 97-99.

bangsa yang tertuang dalam UUD NRI 1945 sebelum mengalami perubahan berkaitan dengan pemerintahan negara yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan kekuasaan belaka (*machsstaat*).²⁸

Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh ditetapkan hanya satu pihak atau golongan tertentu saja. Hukum dibuat untuk menjamin keadilan dan kepentingan semua warga masyarakat, bukan untuk kepentingan orang yang berkuasa. Dengan demikian hukum yang berkembang bukan *absolute rechtsstaat* melainkan *demokratische rechtsstaat*.²⁹ Menurut prinsip negara hukum, bahwa suatu negara yang memerintah itu bukan manusia melainkan hukum. Hukum adalah sebagai sebuah kesatuan dalam tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Oleh sebab itu aturan dasar konstitusional harus dijadikan sebagai dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat.

2. Konstitusi Pemilihan Umum

a. Sebelum Masa Orde Baru

Pada tahun 1946 Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta Menerbitkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 November 1945, tentang pembentukan partai-partai politik. Sebagai langkah awal untuk dilaksanakannya pemilihan umum di Indonesia.

²⁸ Ratna Riyanti, *Pemilihan Umum Anggota DPRD di Jawa Tengah Berbasis Keadilan Gender Tahun 2014*, dalam Disertasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, hlm. 95-96

²⁹ Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, dalam Jurnal Hukum, Nomor 3, Volume 16, Juli 2009, hlm. 379-395.

Pemilihan umum pertama yang dilaksanakan di Indonesia adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diselenggarakan tanggal 29 September 1955 dan 15 Desember 1955.³⁰

b. Masa Orde Baru

Pemilihan umum yang kedua dilaksanakan tanggal 9 Juli 1971 berdasar pada diterbitkannya Ketetapan MPRS No. XLII/1968 yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan Umum yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977. Pelaksanaan pemilu diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1975 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969.

Pemilihan Umum yang keempat dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982. Sistem Pemilu 1982 tidak berbeda dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1971 dan Pemilu 1977, yaitu masih menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional).

Pemilihan Umum yang kelima dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987 berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.

³⁰ Evi Noviawati, *Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, di dalam Jurnal Online Universitas Galuh, Volume 7, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 78-79.

Pemilihan Umum yang keenam dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1992. Pemilu dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1988 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Volume 7 No. 1-Maret 2019 dan telah telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.

Pemilihan Umum yang ketujuh dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997 berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1993 tentang Pemilu serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum.³¹

c. Setelah Masa Orde Baru

Pemilihan Umum yang kedelapan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik dikarenakan banyaknya partai politik yang mengikuti pemilu. Pemerintah bersama DPR menghasilkan Undang-Undang politik yang baru, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

³¹ *Ibid*, hlm. 79-82.

Pemilihan umum yang kesembilan dilaksanakan pada Tahun 2004, guna memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD yang dipilih oleh rakyat pada waktu yang terpisah secara langsung, terdapat dua tahap yaitu 5 April 2004 (Tahap I) pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, tanggal 5 Juli 2004 (Tahap II) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan pemilu diikuti oleh 24 partai politik.

Pemilhan Umum kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh.

Pemilihan Umum kesebelas, dilaksanakan secara bersamaan waktunya atau serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2014. Pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD terlebih dahulu, selanjutnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Pemilu tahun 2014 mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum keduabelas, dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Indonesia melaksanakan pemilu secara serentak dalam waktu bersamaan, yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu dengan menganut asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil dengan sistem proporsional terbuka untuk memilih anggota DPR dan DPRD serta sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD.³²

B. Tinjauan umum tentang Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan di negara yang memiliki tujuan untuk mencapai kedaulatan rakyat. Demokrasi dapat dikatakan sebagai kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat, dimana rakyat memilih langsung wakil rakyat dalam pemilihan umum. Demokrasi menurut bahasa Yunani kuno yaitu '*demos*' yang memiliki arti rakyat, dan '*cratos*' atau '*cratein*' yang berarti pemerintahan, oleh sebab itu demokrasi berarti sebagai pemerintahan oleh rakyat.³³ Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia.

Sementara itu demokrasi menurut pendapat Sidney Hook bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana setiap keputusan yang diambil pemerintah baik langsung atau tidak langsung harus berdasarkan pada persetujuan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat.³⁴ Oleh karena itu dalam hal ini rakyat memiliki ketentuan dalam pokok-

³² *Ibid*, hlm. 82-84.

³³ Hasbi Umar, *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD*, Jurnal Innovatio, Volume VII, Nomor 14, Juli-September 2008, hlm. 315.

³⁴ Sidney Hook, dalam Nakamuru dan Samallawood, *The Politics of Policy Implementation*, st. Martin's press, New York, hlm. 67.

pokok permasalahan dalam kehidupan mereka, termasuk dengan menilai kebijaksanaan dari negara terhadap kehidupan mereka.³⁵

Negara yang menganut sistem demokratis, Indonesia memiliki lembaga yang menjalankan kekuasaan. Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering dikenal dengan *Trias Politica* yang memiliki arti bahwa negara memiliki tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian diwujudkan menjadi tiga jenis lembaga negara yang independen dan sejajar satu sama lain. Ketiga jenis lembaga tersebut adalah kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang dalam hal ini lembaga perwakilan rakyat (MPR, DPR, DPRD, DPD), kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang dalam hal ini dijalankan oleh presiden, wakil presiden dan kabinetnya, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang yaitu dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).³⁶

Negara hukum yang demokratis apabila didalamnya menjalankan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu³⁷ :

- 1) Prinsip-prinsip negara hukum adalah sebagai berikut yang pertama adalah memiliki hak legalitas atau pembatasan kebebasan warga negara yang dilakukan oleh pemerintah, harus sesuai dengan undang-undang sebagai peraturan umum, kemudian adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pemerintah keterikatan pemerintah dengan

³⁵ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 207.

³⁶ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm 85.

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII-Press, 2002, hlm. 8-10.

hukum monopoli pskdssn pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, adanya pengawasan hakim yang merdeka.

- 2) Prinsip-prinsip negara demokrasi yaitu, dimana kekuasaan politik tertinggi dalam suatu perwakilan masyarakat di suatu negara dan di diputuskan oleh dewan perwakilan melalui pemilu. Adanya pertanggungjawaban politik, dimana terdapat badan pemerintahan dalam menjalankan fungsinya bergantung pada lembaga perwakilan. Kemudian adanya pemencaran kewenangan, kewenangan badan politik harus dipencarkan menjadi organ-organ yang berbeda. Terdapatnya pengawasan dan penyelenggaraan yang harus dikontrol. Menurut pendapat Jimly Assidique bahwa negara hukum yang menganut sistem demokrasi harus mengidealkan suatu mekanisme bahwa negara tersebut haruslah demokratis, dan negara demokrasi harus didasari atas hukum.³⁸

Seiring berjalannya waktu, demokrasi memiliki banyak arti. Namun demikian, terdapat banyak kesamaan penting dalam berbagai arti, kesamaan tersebut didasarkan pada standar yang mencerminkan konsep demokrasi dan menunjukkan universalitas konsep demokrasi. Menurut Hendry B. Mayo ada beberapa ciri utama yang harus dipertimbangkan untuk menilai apakah suatu masyarakat itu demokratis atau tidak, yaitu³⁹:

- 1) Perselisihan diselesaikan dengan damai dan suka rela.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, "Demokrasi dan Monokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru", *Kapita Selekta Teori Hukum*, Jakarta: FH UII, 2001, hlm.141-144.

³⁹ Nadrilun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2012, Hlm.8-10.

- 2) Apabila terjadi perubahan dalam suatu masyarakat yang sedang berkembang perlu adanya jaminan.
- 3) Pergantian kekuasaan yang dilakukan secara berkala.
- 4) Memberikan batasan minimum terhadap kekerasan.
- 5) Adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman.
- 6) Pemberian jaminan akan keadilan.
- 7) Adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan.
- 8) Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

2. Demokrasi Di Indonesia

a. Periodisasi Demokrasi di Indonesia

Pada periode demokrasi tahun 1945-1959 Indonesia menggunakan demokrasi parlementer, yang berlaku sebulan setelah kemerdekaan dan diperkuat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UUDS Tahun 1950, namun kurang cocok diterapkan di Indonesia. Lemahnya demokrasi parlementer mengakibatkan partai-partai dan Dewan Perwakilan Rakyat mendominasi.⁴⁰ Dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 menetapkan demokrasi parlementer yang artinya Presiden merupakan kepala negara dan para menteri akan bertanggung jawab atas politik. Namun dalam periode ini kedudukan parlementer sangat kuat sama halnya dengan partai politik, oleh karena itu

⁴⁰ Richard Mann, Penerj, Maria Irawati Yulianto, SS, *Memperjuangkan Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta: PT Enka Parihiyangan.

segala sesuatu atau kebijakan negara tidak lepas dari sikap kritis para anggota parlemen.⁴¹

Pada era demokrasi terpimpin periode tahun 1959-1965 Dalam UUD NRI Tahun 1945 memberikan kesempatan pada Presiden untuk memimpin selama lima tahun demi tegaknya demokrasi di Indonesia. Namun hal itu bertentangan dengan keinginan bangsa Indonesia, sebab demokrasi terpimpin lebih di dominasi oleh presiden, adanya batasan peranan politik, dan berkembangnya pengaruh komunis dan ABRI sebagai unsur sosial politik.⁴²

Periode demokrasi pancasila tahun 1965-1998 di Indonesia Pada saat itu Presiden yang memimpin adalah Soeharto yang dimana dikenal sebagai Orde Baru. Di dalam demokrasi pancasila memandang bahwa kedaulatan rakyat itu merupakan inti dari demokrasi, dimana rakyat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam politik. Namun dalam orde baru hanya sampai gagasan saja belum sampai pada penerapannya.⁴³

Bercermin pada pengalaman manipulasi Orde baru. Di bawah pemerintahan Pancasila, demokrasi yang akan berkembang setelah itu demokrasi tanpa nama. Demokrasi tanpa embel-embel dan hak rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme dan implementasi pemerintahan yang demokratis. Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama pada pelaksana

⁴¹ Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*, di dalam Jurnal Universitas Palembang, Volume 18, Nomor 2, Mei 2020, hlm. 255-256.

⁴² *Ibid*, hlm 256.

⁴³ *Ibid*, hlm 257.

kekuasaan. Pada saat ini demokrasi ini telah dilaksanakan pemilihan umum agar lebih demokratis, sehingga terjadi perputaran kekuasaan di pemerintahan. Hak-hak warga negara terjamin dengan diberikannya kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya.⁴⁴

b. Penerapan Sistem Demokrasi Di Indonesia

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan suatu momen yang penting bagi proses demokrasi di Indonesia, Indonesia sendiri telah melaksanakan Pemilu secara berlaka sejak waktu yang cukup lama. Keberadaan Pemilu merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan yang demokratis. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Republik Indonesia tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum atau pemilu adalah adalah salah satu mekanisme demokrasi yang menjadi penentu pergantian pemerintahan.⁴⁵

Pada Pemilihan umum serentak tahun 2004, masyarakat tidak hanya memilih DPR, DPD dan DPRD tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada langsung di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 258.

⁴⁵ Yuliani Widianingsih, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, di dalam Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati, 2017, hlm. 2-4.

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, calon Pilkada adalah calon yang diusulkan oleh partai politik atau partai politik.⁴⁶

C. Tinjauan umum tentang Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum adalah instrumen yang sangat penting di dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.⁴⁷ Pemilihan negara demokratis merupakan salah satu elemen terpenting, karena salah satu alat ukur untuk mengukur penerapan demokratis di suatu negara adalah bagaimana negara tersebut melakukan pemilihan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan rakyat.⁴⁸

Pemilu sebagai kegiatan rutin yang diadakan setiap lima tahun sekali, serangkaian upaya telah dilakukan untuk mewujudkan esensi melalui proses pemilihan wakil rakyat yang responsif, kapabel, dan representatif, serta upaya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Menyelenggarakan pemilu yang demokratis merupakan unsur pokok dalam pemerintahan yang demokratis.⁴⁹

Pemilu merupakan sarana untuk menyediakan fasilitas dalam proses pemberian suara oleh rakyat untuk menentukan siapa yang memiliki kekuasaan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan bertanggungjawab untuk lima tahun ke depan.⁵⁰

⁴⁶ Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, Cetakan-1, hlm 58.

⁴⁷ Ismail Suny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif : Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tatanegara*, Jakarta : Aksara Baru.

⁴⁸ G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. hlm.1.

⁴⁹ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan : Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, PT. Gramedia Pustaka, 1997, hlm. 1.

⁵⁰ M. Zaid Wahyudi, *Menjaga Pemilu tetap Luber, Jurdil*, Harian Kompas, 10 Maret 2009, hlm. 7.

Pemilu adalah sebuah ajang kompetisi untuk menentukan jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang berdasarkan pada pilihan langsung masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan. Peserta pemilu dapat dari perseorangan namun yang diutamakan adalah dari partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.⁵¹

Berdasarkan Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945, pemilu diselenggarakan oleh suatu badan yaitu KPU yang memiliki sifat tetap dan mandiri. Hal itu menjadikannya sangat penting karena artinya keberadaannya dijamin dan dilindungi secara konstitusional dalam UUD NRI 1945. Sangat disayangkan keinginan untuk membentuk lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri terganggu dengan adanya rumusan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan yang menyelenggarakan pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 bahwa lembaga yang menyelenggarakan pemilu adalah KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.⁵² Pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD,

⁵¹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, 2009.

⁵² Josner Simanjuntak, *Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, November 2016, hlm. 125.

Dewan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008. Kedaulatan menurut Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945.⁵³

Sistem pemilihan umum adalah metode yang mengatur dan memberikan kemudahan untuk para warga negara untuk memilih pejabat politik di antara mereka sendiri. Dalam pemilihan umum warga memiliki hak untuk memilih kandidat yang akan menduduki badan perwakilan.⁵⁴

D. Tinjauan umum tentang Pemilihan Kepala Daerah

1. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering disebut Pilkada atau Pemilukada, merupakan suatu perwujudan dari demokrasi dalam rangka untuk menciptakan pemerintah yang demokratis, dan merupakan suatu perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.⁵⁵ Pemimpin daerah adalah jabatan politik yang bertanggung jawab memimpin dan mendorong laju pemerintahan.

Pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan pelaksanaan pilkada harus dilaksanakan secara demokrasi,

⁵³ Latipah Nasution, *Pemilu dan Kedaulatan Rakyat*, Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1, Nomor 9B, 2017, hlm. 83.

⁵⁴ Ratna Riyanti, *Op Cit*, hlm. 109.

⁵⁵ Janpatar Simamora, *Eksistensi Pemilukada.. Op Cit*, hlm. 1.

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berikut adalah yang menjadi dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah⁵⁶ :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi

⁵⁶ Noor M. Aziz, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Badan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, hlm. 48-49.

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non-alam Corona Virus *Disease 2019* (Covid-19).

Sistem pemilu adalah suatu kesatuan metode yang memudahkan masyarakat untuk memilih pejabat politik yang akan menduduki lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem pemilu ini sangat penting terhadap pemerintahan demokrasi perwakilan⁵⁷, sebab :

1. Sistem pemilu mempunyai akibat pada tingkat proporsionalitas atau keseimbangan hasil pemilihan.
2. Sistem pemilu memiliki pengaruh pada bentuk kabinet yang akan dibentuk.
3. Sistem pemilu akan membentuk suatu sistem partai yang khusus memiliki keterkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem tersebut.
4. Sistem pemerintahan memengaruhi pertanggungjawaban dari pemerintahan, khususnya dari para wakil terhadap masyarakat.

⁵⁷ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya, Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), 2006, hlm 4-5.

5. Sistem pemilu memiliki dampak pada tingkat hubungan antar partai politik satu dengan yang lainnya.
6. Sistem pemilu mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi politik warga negara.
7. Sistem pemilu lebih rentan untuk dimanipulasi atau dipalsukan dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya.
8. Sistem pemilu juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.⁵⁸

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dipandang sebagai simbol dan ukuran demokrasi. Hasil pemilu yang dilakukan secara terbuka dengan kebebasan berpendapat dan berserikat diyakini sampai batas tertentu mencerminkan partisipasi dan keinginan rakyat. Meski begitu, masyarakat berpendapat bahwa pemilu bukanlah satu-satunya dan perlu adanya kegiatan lain yang lebih berkesinambungan, seperti mengikuti kegiatan politik, *lobbying*, dan lain sebagainya. Pemilihan terhadap jenis pilkada secara langsung selalu mempertimbangkan aspek pengakuan masyarakat dan tingkat keberhasilan atau efisiensi, yang disebut dengan *trade off*.⁵⁹ Yang memiliki arti memilih sistem dengan pengakuan yang tinggi menimbulkan konsekuensi yang sangat tidak efisien. Sebaliknya, apabila hanya sekedar melihat dari sisi efisiensi akan menimbulkan hasil pilkada yang pengakuannya rendah.

⁵⁸ Agus Pramusinto, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004*, Jurnal Analisis CSIS Volume 33, Nomor 2, Juni 2004, hlm. 240

⁵⁹ Joko J. Prihatmoko *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 115.

Sejak Indonesia menggunakan pemerintahan presidensial, pemilihan kepala daerah di daerah merupakan bagian dari pengelolaan pemerintah pusat. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan berkewajiban untuk memenuhi kewajiban pemerintahan dan mencapai tujuan negara Indonesia yang diatur dalam Pembukaan ayat keempat UUD NRI 1945. Karena banyaknya tugas dan kewajiban Presiden, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan bantuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan negara. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah besar (provinsi) dan daerah kecil. (Kabupaten / Kota).⁶⁰

Pilkada yang diselenggarakan secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan umum dewan legislatif. Pilkada dianggap sebagai kelanjutan dari yang dicita-citakan reformasi yang diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, karena konstitusi menjamin kedaulatan rakyat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara.⁶¹ Pilkada serentak yang dilaksanakan pada saat ini bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka NKRI.

Kurang berperannya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menyebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada atau yang ditetapkan mempunyai materi yang tumpang tindih satu sama lain

⁶⁰ Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009, hlm. 157.

⁶¹ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose, 2015, hlm.16

serta masih ada peraturan perundang-undangan yang kurang mencerminkan keadilan. Hal ini juga diikuti dengan tindakan pembatasan keterlibatan masyarakat oleh pemerintah dan DPR untuk berperan secara aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan permasalahan dan sekaligus menjadi tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan di bidang hukum.⁶² Dalam pelaksanaannya, harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yakni :

Pertama, pelaksanaan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan menimbang aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah. **Kedua**, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih memperhatikan peran dari fungsi leglatif daerah, pengawasan, dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. **Ketiga**, penyelenggaraan otonomi daerah harus berdasar pada konstitusi negara untuk menjamin hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah.⁶³ Ada beberapa pertimbangan dalam menyelenggarakan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia :

Pilkada langsung adalah suatu bentuk jawaban atas keinginan rakyat, pemilihan kepala daerah langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD NRI 1945. Kemudian pemilihan kepala daerah

⁶² Imawan Sugiharto, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif*, dalam Disertasi Universitas Islam Sultan Agung, 2016, hlm. 2-3./ jurnal.unissula.ac.id

⁶³ *Ibid*, hlm 180.

langsung sarana pembelajaran demokrasi (politik). Pilkada merupakan sarana pembelajaran yang menerapkan demokrasi bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat membentuk pemahaman bersama seluruh warga negara menyadari pentingnya memilih pemimpin yang tepat sesuai dengan hatinya.⁶⁴

2. Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Seiring dengan banyaknya kegiatan pilkada secara langsung di berbagai daerah, pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut mengembalikan sistem pilkada kepada DPRD. Namun, mendapatkan penolakan oleh rakyat. Pada tahun 2015, pada era presiden Joko Widodo, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi undang-undang.⁶⁵

Dengan adanya undang-undang tersebut, pemilihan kepala daerah kembali dilakukan secara langsung dan serentak. Beberapa tahun sebelumnya pelaksanaan pilkada dilakukan serentak namun belum tentu pada bulan dan tanggal yang sama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sudah mengalami empat kali perubahan dan pembaharuan. Pembaharuan pertama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

⁶⁴ Irham Fauzi, *Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada*, Yogyakarta, Paper present at Jurusan Teknik Informatika STIMIK Amikom, 2011, hlm. 2.

⁶⁵ Topan Yuniarto, "Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia", Kompaspedia, 7 Desember 2020. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia>

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pembaharuan ketiga melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dimana didalamnya mengatur tentang perlunya penundaan Pilkada tahun 2020. Perubahan keempat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang.⁶⁶

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pertama kali berlangsung pada tahun 2015 yang diselenggarakan di 269 wilayah yang mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia. Pilkada langsung yang dilakukan secara serentak dimaksudkan untuk mengurangi atau meminimalkan *cost*, baik sosial, politik, maupun ekonomi yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pilkada.⁶⁷

Sebelum dilakukan pilkada serentak, hampir setiap pekan dilaksanakan pemilihan kepala daerah di wilayah-wilayah Indonesia, yang dapat mengakibatkan gejolak yang dapat dipicu oleh beberapa faktor. Dalam rangka untuk meminimalisir potensi konflik sosial dan gejolak politik, pemerintah dan DPR membuat kesepakatan untuk menyelenggarakan pilkada langsung secara serentak yang dapat diharapkan terlaksana secara nasional pada tahun 2024 mendatang.⁶⁸

Disamping untuk meminimalkan *cost*, pilkada yang dilakukan secara serentak diharapkan lebih efisien dari segi biaya atau waktu. Dalam

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Prayudi, *et al.*, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Penerbitan DPR RI, 2017, hlm. 4.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 5.

pelaksanaan pilkada dibutuhkan biaya yang cukup besar, dimana APBD tersedot untuk keperluan kegiatan pilkada. Melalui pilkada serentak sebagian biaya akan menjadi beban APBN, diharapkan terjadi efisiensi terkait dengan pengeluaran pesta demokrasi lokal tersebut.⁶⁹

E. Tinjauan umum tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dijamin dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945. Karena itu disebut sebagai lembaga yang penting, KPU ditegaskan untuk bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen).⁷⁰ Yang memiliki derajat yang sama dengan lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh undang-undang.

KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum diharapkan dapat menjadi lembaga yang mandiri atau independen, sehingga dapat menjaga proses secara adil dan transparan dengan hasil yang dapat dipercaya oleh rakyat. Hanya dengan kewenangan dan kelembagaan yang independen itulah pemilu dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas di satu sisi, dan menjaga kesinambungan proses demokrasi yang sedang dibangun pada sisi lainnya.⁷¹

Independensi sudah menjadi asas universal bagi lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan Pemilu, mengawasi pemerintah, atau lembaga investigasi atas kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 6.

⁷⁰ Sudarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004*, Oleh Mahkamah Konstitusi, 2005, hlm. 122.

⁷¹ *Ibid*.

pemerintah. Independensi yang harus diperhatikan dan dipertahankan lembaga-lembaga meliputi tiga hal, yaitu : *independensi institusional* adalah bukan merupakan bagian institusi negara yang ada dan tidak bergantung pada lembaga negara lainnya, *independensi fungsional* maksudnya adalah KPU tidak boleh dicampuri atau diperintah oleh pihak manapun yang melaksanakan Pemilu, *independensi personal* adalah bahwa anggota KPU harus jujur, imprasial, kapasita, dan kapabilitas.⁷²

Sifat independen telah dituangkan di dalam beberapa pasal yang terdapat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, pertama dalam pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa KPU dalam menjalankan tugasnya harus menyampaikan laporan atau pemberian informasi tentang penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR. Kedua, dalam pasal 16 ayat (3) bahwa ketua dan wakil ketua KPU di pilih oleh anggota bukan/ dari lembaga lain.⁷³

Arti penting dari independensi KPU didasarkan pada empat hal, : Pertama, pemilihan umum sebagai prosedur dan mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara, baik legislatif atau eksekutif yang akan bertanggungjawab kepada rakyat dan atas nama rakyat. Kedua, pemilihan umum merupakan mekanisme

⁷²Suparman Marzuki, *Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokratis*, di dalam Jurnal Hukum, Volume 15, Nomor 3, Juli 2008, hlm. 399-400.

⁷³ *Ibid.*

pemindahan aspirasi dari rakyat baik pusat atau daerah. Ketiga, pemilihan umum merupakan prosedur perubahan politik secara teratur dan tertib.⁷⁴

F. Tinjauan umum tentang *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Pada Desember 2019 pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei ditemukan kasus penyakit misterius yang dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Penyakit ini awalnya dinamakan sebagai *2019 novel coronavirus* (2019-nCoV). Kemudian WHO mengumumkan nama baru yaitu *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Covid-19 pertama kali dilaporkan ada dua kasus di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain adalah gangguan pernapasan akut, demam, batuk, dan lain sebagainya. Masa inkubasi virus rata-rata 5-6 hari atau paling lama selama 14 hari. Covid-19 saat ini masih menjadi permasalahan bagi beberapa negara di dunia dengan jumlah kasusnya yang selalu mengalami peningkatan setiap harinya.

Coronavirus merupakan golongan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya dapat berupa infeksi pernapasan, flu biasa, hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Ada pula Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia dan menyebabkan penyakit *Corona Virus Disease* (Covid-19). Covid-19

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 403-404.

disebabkan oleh SARS-COV2 yang masih termasuk ke dalam keluarga besar Coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya gejalanya saja yang berbeda.⁷⁵

Covid-19 telah menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, berbagai upaya yang berupa himbauan telah dikeluarkan oleh pemerintah namun masih belum dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan ada pula yang menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar secara luas di negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu virus ini mulai meresahkan terutama ketika pemerintah menetapkan berbagai aturan tentang pemakaman yang dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan serta dengan diberlakukannya *social distancing*.

Untuk menanggulangi antisipasi dari virus ini, ada berbagai rangkaian regulasi yang mengatur tentang upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu :

1. Pasal 4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

⁷⁵ Promkes Kementerian Kesehatan RI dan Perhimpunan Dokter Indonesia, *Informasi Tentang Virus Corona (Novel Coronavirus)*, infeksiemerging.kemkes, Maret 2020.

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu.

Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Covid-19 merupakan salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya.⁷⁶ Menurut beberapa praktisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dapat diterapkan saat ini karena perkembangan virus yang semakin ganas setiap harinya guna menanggulangi penyebaran virus Covid-19, virus ini juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kesehatan masyarakat serta ekonomi, sosial, dan juga keagamaan.

Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan kepada masyarakat untuk menekan laju virus agar tidak semakin meluas, seperti pemberlakuan kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun tidak efektif dan justru menambah penyebaran virus dikarenakan tidak diperbolehkan keluar rumah dan kebutuhan sehari-hari pun tidak terpenuhi. Menurut pakar hukum apabila pemerintah menerapkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, dengan menerapkan karantina wilayah, masyarakat kecil dengan penghasilan harian atau sektor informal tidak perlu khawatir dengan kebutuhan sehari-hari karena segala kebutuhan akan menjadi

⁷⁶ Toar Palilingan, "Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah Covid-19", Manadopost.id, April, 2020.
<https://www.google.com/amp/s/manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-penanganan-wabah-covid-19/amp/>,

tanggung jawab pemerintah.⁷⁷ Memang bukan pilihan mudah bagi pemerintah, tetapi bisa dilakukan dengan pengalihan anggaran yang sudah diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau masyarakat.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yang dimaksud dengan kekarantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud karantina wilayah menurut Pasal I Ayat (10) adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

⁷⁷ Yulida Medistira, "UU Kekarantina Kesehatan Dinilai Sudah Bisa Diterapkan Pemerintah", detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-4954336/uu-kekarantina-kesehatan-dinilai-sudah-bisa-diterapkan-pemerintah>, Maret 2020.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pemilihan kepala daerah atau sering disebut dengan Pilkada serentak di Indonesia merupakan wujud dari pesta demokrasi yang diselenggarakan pada akhir tahun 2020 yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Sebelumnya pelaksanaan Pilkada Serentak akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020 namun pemerintah dan DPR memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pilkada akibat dari pandemi Covid-19, KPU sebagai penyelenggara pemilihan telah mengambil langkah penundaan tahapan Pilkada yang tengah berjalan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020. Kemudian Presiden menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. Menurut ketentuan Pasal 201A ayat (2) ditegaskan bahwa pemungutan suara Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada bulan 9 Desember 2020.⁷⁸

⁷⁸ Supriyadi, *Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 22, Nomor 3, Desember 2020, hlm. 495.

Pemilihan langsung dan serentak lima tahunan ini merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilaksanakan. Permasalahan yang terjadi pada pilkada serentak tahun 2020 ini diakibatkan karena pelaksanaannya dilakukan di tengah pandemi Covid-19 dimana pemerintah mengharuskan untuk melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing*. Sementara itu, pada saat pelaksanaan Pilkada akan ada pengumpulan massa, mulai dari tahapan penyusunan daftar pemilih, penetapan bakal pasangan calon, kampanye, sampai dengan pada saat pemungutan suara. Hal ini juga berdampak pada peserta pasangan calon untuk melakukan kampanye yang biasanya dilakukan dengan pengumpulan banyak orang agar mendapatkan dukungan pemilih untuk mendapatkan suara terbanyak.⁷⁹

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, tak terkecuali daerah yang melaksanakan Pilkada seperti di Kabupaten Pematang Jaya. Hal tersebut, menjadikan pilkada serentak tahun ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Perbedaan tersebut tampak dengan adanya PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dimana di dalam peraturan

⁷⁹ Putri Hergianasari, *Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 01, Nomor 1, Agustus 2020, hlm. 113.

tersebut disisipkan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada.⁸⁰ Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lanjutan di Kabupaten Pemalang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan jumlah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebanyak 3 pasangan calon. Terdapat beberapa tahapan penyelenggaraan dari Pilkada di Kabupaten Pemalang tahun 2020, yaitu :

1. Penyusunan Daftar Pemilih

Kabupaten Pemalang, terdapat di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 14 kecamatan, 11 kelurahan dan 211 desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 1.305.668 jiwa dengan luas wilayah 1.118,03 km. Hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Moga	31.757	32.269	64.026
2	Pulosari	28.026	28.480	56.506
3	Belik	52.960	52.543	105.503
4	Watukumpul	32.511	32.838	65.349
5	Bodeh	27.383	27.772	55.155
6	Bantarbolang	35.076	37.784	72.860
7	Randudongkal	48.111	50.669	98.780
8	Pemalang	88.611	90.479	179.098
9	Taman	80.896	82.256	163.152
10	Petarukan	73.377	74.891	148.269
11	Ampelgading	33.031	34.101	67.132
12	Comal	44.557	45.053	89.610
13	Ulujami	50.315	50.613	100.928
14	Warungpring	19.381	19.930	39.310
Jumlah Akhir		645.991	659.677	1.305.668

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang.

⁸⁰Supriyadi, *Menakar Nilai ..Op Cit*, hlm. 494-495.

Pada tabel 1 diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 terdiri dari laki-laki sebanyak 645.991 jiwa dan perempuan sebanyak 659.677 jiwa. Sedangkan jumlah pemilih di Kabupaten Pemalang adalah sebanyak 1.114.711 jiwa, yang terdiri dari jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTB). Hal ini dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Jumlah Pemilih Dalam DPT Kabupaten Pemalang

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Moga	28.266	27.208	55474
2	Pulosari	23.488	23.078	46.566
3	Belik	45.303	43.857	89.160
4	Watukumpul	29.058	27.814	56.872
5	Bodeh	24.168	23.706	47.874
6	Bantarbolang	32.877	32.671	65.548
7	Randudongkal	43.397	42.671	86.056
8	Pemalang	73.739	72.991	146.730
9	Taman	69.537	68.483	138.020
10	Petarukan	64.235	63.167	127.402
11	Ampelgading	28.231	28.255	56.486
12	Comal	35.478	35.115	70.593
13	Ulujami	43.105	42.147	85.252
14	Warungpring	17.219	16.765	33.984
Jumlah Akhir		558.101	547.916	1.106.017

Sumber : KPU Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Tabel 3. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Moga	4	11	15
2	Pulosari	6	4	10

3	Belik	10	3	13
4	Watukumpul	4	3	7
5	Bodeh	9	10	19
6	Bantarbolang	3	2	5
7	Randudongkal	4	3	7
8	Pemalang	100	85	185
9	Taman	31	45	76
10	Petarukan	5	13	18
11	Ampelgading	7	5	12
12	Comal	61	41	102
13	Ulujami	5	0	5
14	Warungpring	3	3	6
Jumlah Akhir		252	228	480

Sumber : KPUD Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Tabel 4. Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar Dalam DPT yang

Menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat

Keterangan (DPTb)

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Moga	123	135	258
2	Pulosari	151	148	299
3	Belik	196	281	477
4	Watukumpul	190	257	447
5	Bodeh	67	97	164
6	Bantarbolang	291	333	624
7	Randudongkal	288	361	649
8	Pemalang	707	820	1.527
9	Taman	658	794	1.452
10	Petarukan	425	540	965
11	Ampelgading	111	159	270
12	Comal	164	186	350
13	Ulujami	270	362	632
14	Warungpring	44	56	100
Jumlah Akhir		3.685	4.529	8.214

Sumber : KPUD Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Tabel 5. Jumlah Pemilih Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	L	558.101
	P	547.916
	JUMLAH	1.106.017
Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	L	252
	P	228
	JUMLAH	480
Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	L	3.685
	P	4.529
	JUMLAH	8.214
Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	L	562.038
	P	552.673
	JUMLAH	1.114.711

Sumber : KPUD Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2, 3, 4, dan 5 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 1.106.017 jiwa, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) sebanyak 480 orang, dan jumlah pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang memilih menggunakan KTP atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 8.214 jiwa. sehingga jumlah total pemilih adalah 1.114.711 jiwa.

2. Pencalonan dan Penetapan Bakal Pasangan Calon

Pelaksanaan pendaftaran pilkada tahun 2020 tidak diperbolehkan adanya iring-iringan atau arak-arakan saat pendaftaran. Menurut Pasal 49 Ayat 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2020 bahwa tata cara pendaftaran harus sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Di Kabupaten Pemalang terdapat 3 pasangan calon yang mendaftarkan sebagai Bupati atau Wakil Bupati Pemalang. Hal ini dapat ditunjukan di tabel di bawah ini.

**Tabel 6. Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun 2020**

No	Nama Paslon	Partai Pengusung	Status Penelitian Berkas Perbaikan
1.	H.M. AGUS SUKOCO, dan H.EKO PRIYONO	PDI PERJUANGAN	Memenuhi Syarat
		PARTAI GOLKAR	
		PARTAI NASDEM	
2.	ISKANDAR ALI SYAHBANA dan AKHMAD AGUSWARDANA	PKB	Memenuhi Syarat
		PKS	
3.	MUKTI AGUNG WIBOWO dan MANSUR HIDAYAT	PPP	Memenuhi Syarat
		PARTAI GERINDRA	

Sumber : KPUD Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Berdasarkan tabel 6 bahwa yang memenuhi persyaratan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 terdapat 3 pasangan calon, yaitu H.M. Agus Sukoco dan H. Eko Priyono, kemudian Iskandar Ali syahbanadan Akhmad Aguswardana. Serta Mukti Agung Wibowo, dan Mansur Hidayar. Penyampaian berkas atau perlengkapan secara fisik harus dibungkus dengan bahan anti air kemudian akan disemprotkan cairan disinfektan, petugas yang menerima dokumen wajib menggunakan alat pelindung diri / masker serta melakukan pembatasan jumlah orang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Apabila pada masa pendaftaran terdapat kerumunan massa, Bawaslu akan melakukan rapat koordinasi dan memberikan surat peringatan bagi yang melanggar.

3. Masa Kampanye.

Kampanye merupakan salah satu program yang penting untuk mendukung pemilihan umum (Pemilu) dimana dalam kegiatan tersebut para bakal pasangan calon memperkenalkan visi dan misi nya kepada masyarakat. Menurut Pasal 267 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 definisi dari kampanye adalah suatu pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat dan dilakukan dengan tanggung jawab dan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pada kondisi pandemi, melaksanakan kegiatan kampanye berbeda dan tidak mudah, ruang bagi pasangan calon untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar (kampanye rapat umum) hampir dipastikan tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Padahal mekanisme kampanye dengan mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar masih menjadi proses elektoral yang sangat identik dalam pelaksanaan pesta demokrasi lokal di Indonesia. Hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan ialah kampanye dengan metode daring (online), namun menggunakan sepenuhnya metode daring dalam pelaksanaan kampanye juga memiliki keterbatasan terutama dari aspek sarana dan prasarana.⁸¹

Aturan mengenai kampanye selama pandemi terdapat di Bab VI PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kampanye, KPU RI melarang beberapa kegiatan dalam tahapan kampanye pada pilkada serentak Tahun

⁸¹ Supriyadi, *Menakar Nilai ..Op Cit*, hlm. 502

2020, yang sebelumnya dilakukan kegiatan seperti rapat umum, acara konser musik dan pentas budaya, acara olahraga seperti jalan sehat dan, sepeda santai, perlombaan, atau peringatan hari ulang tahun parpol diijinkan, namun kemudian di dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 perizinan tersebut telah dihapus. Apabila ada pasangan calon yang mengumpulkan massa akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis atau pembubaran secara paksa.⁸² Hal ini ditunjukkan data kegiatan pencegahan pelanggaran dan kegiatan kampanye di Kabupaten Pemalang.

Tabel 7. Data Kampanye dan/ Kegiatan Lainnya

Kabupaten	Jumlah Kampanye	Jumlah Kampanye Tanpa STTP	Jumlah Kegiatan Lainnya	Penertiban Apk
	Total			
Pemalang	581	5	218	11.869

Sumber : Bawaslu Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Tabel 8. Data Pencegahan Pelanggaran Protokol Kesehatan

Kabupaten	Pencegahan			Jumlah Peringatan Tertulis
	Jumlah Pencegahan	Jumlah Surat Imbauan	Jumlah Saran Perbaikan	
Pemalang	397	296	131	8

Sumber : Bawaslu Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Menurut hasil wawancara dari Anggota/Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Abdul Maksus) bahwa “*Pencegahan dapat berupa pencegahan secara tertulis atau surat imbauan dan secara lisan atau langsung. Dalam hal ini di Kabupaten*

⁸² Fitang Budhi Aditya, “Izin Konser Dihapus, Ini 7 Aturan Baru PKPU Saat Kampanye Pilkada”, IDN Times, September 2020, <https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/news/indonesia/amp/fitang-adhitia/izin-konser-dihapus-ini-7-aturan-baru-pkpu-saat-kampanye-pilkada>,

*Pemalang terdapat 397 pencegahan secara langsung, 296 pencegahan secara tertulis berupa surat imbauan. Kemudian setelah Bawaslu memberikan surat imbauan terdapat kekurangan atau kesalahan-kesalahan, maka langkah perbaikan yang dilakukan adalah menggunakan surat saran perbaikan sebanyak 131. Apabila setelah diberikannya surat perbaikan tidak ada perbaikan maka akan diberikan penindakan atau penanganan pelanggaran”.*⁸³

Terdapat 581 kegiatan kampanye di Kabupaten Pemalang, dimana ditemukan kegiatan yang melanggar protokol kesehatan sebanyak 8 (delapan). Apabila terbukti adanya pelanggaran, Bawaslu akan memberikan peringatan berupa peringatan tertulis kepada yang melakukan pelanggaran. Salah satu pelanggaran kampanye yang terjadi di lapangan adalah kampanye tatap muka yang dilakukan oleh calon Bupati Pemalang nomor urut 2 Mukti Agung Wibowo yang melakukan blusukan ke kampung di Kelurahan Pelutan, Pemalang. Dalam kegiatan tersebut terdapat kerumunan dan tampak berdesakan, serta mengabaikan *physical distancing* (menjaga jarak fisik).

Kampanye yang melibatkan banyak orang kemudian menimbulkan kerumunan, dan tidak menggunakan masker termasuk ke dalam pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga hal tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan koordinasi bersama KPU. Pelanggaran tersebut dikenai sanksi berupa *skorsing*, yaitu tidak diperkenankan melaksanakan

⁸³Hasil wawancara dengan Anggota/Koordinator Divisi Pengawasan BAWASLU Kabupaten Pemalang, hari Jumat, tanggal 11, bulan Desember, tahun 2020, jam 10.17 pagi.

kampanye selama 3 hari terhitung dari hari kampanye. Pada saat proses penindakan pelanggaran akan berkoordinasi dengan gugus tugas, KPU, Bawaslu dan kepolisian.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran, pihak-pihak yang terlibat penyelenggaraan kampanye politik Pilkada 2020 akan diberikan sanksi administratif berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, yaitu :

Pertama, apabila terjadi pelanggaran ketika kegiatan kampanye sedang berlangsung akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sanksi berupa surat peringatan tertulis ini diatur pada Pasal 88A Ayat (2), Pasal 88B Ayat (2), Pasal 88C Ayat (2) (a), Pasal 88D bagian (a), dan Pasal 88E Ayat (3) (a).

Kedua, jika sudah diberikan surat peringatan tertulis tidak dipatuhi oleh yang melanggar, pihak berwenang kemudian akan memberikan sanksi berupa penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye yang sedang berlangsung. Sanksi ini terdapat di dalam Pasal 88A Ayat (3), Pasal 88B Ayat (3), Pasal 88C Ayat (2) (b) dan Pasal 88D Ayat (b). Menurut Pasal 88B Ayat (3), pihak yang melakukan pelanggaran diharuskan untuk membuat surat perjanjian berisi tentang tidak akan mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan. Untuk Pasal 88E Ayat (3) (b), menghimbau beberapa golongan seperti wanita hamil, orang lanjut usia dan anak-anak agar tidak mengikuti kegiatan kampanye secara langsung.

Ketiga, larangan untuk melaksanakan kegiatan kampanye sementara yang diberikan apabila pihak yang melanggar tidak mematuhi sanksi peringatan tertulis dan pembubaran atau pemberhentian kegiatan kampanye sebagaimana yang terdapat pada Pasal 88D bagian (c), maka pihak yang melanggar dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan kampanye selama tiga hari berdasarkan rekomendasi oleh Bawaslu Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

Namun, sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan tersebut cukup ringan, yang mengakibatkan pelaku tidak gentar ataupun jera. Pelanggaran protokol kesehatan seharusnya berpacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Apabila ada yang tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan akan diberikan sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 93 Undang-Undang kekarantinaan kesehatan, berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

Tahapan ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan Pilkada, ruang bagi pemilih untuk bebas menggunakan hak politiknya dan pada tahapan ini pemilih bebas secara mandiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon kepala daerah berdasarkan pilihannya melalui bilik suara. Pada saat kegiatan pemungutan suara penerapan protokol kesehatan dilaksanakan secara maksimal. Dimulai

dengan memastikan setiap calon pemilih dan petugas di TPS menggunakan masker atau *face shield*, kemudian melakukan pengecekan suhu badan terhadap setiap warga yang akan memilih, wajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, apabila jauh dari sumber air gunakan *hand sanitizer*. Tempat duduk harus memiliki jarak sekurangnya 1 meter, menyediakan sarung tangan sekali pakai sehingga tidak menyentuh langsung dengan kertas suara atau alas coblos.

Semua hal ini harus diperhatikan agar mengurangi celah penularan virus, hal ini diharapkan menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat tidak khawatir dan merasa aman untuk menggunakan hak suaranya dan datang ke TPS.⁸⁴ Pada saat pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Pemalang tahun 2020 terdapat 764.337 yang memberikan hak pilihnya. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak 338.905 suara atau 44,4 persen. Hal ini ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut

⁸⁴ Nur Kholis, "Pilkada Serentak 2020.. *Op Cit.*

Tabel 9. Data Pengguna Hak Pilih

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	L	333.349
	P	422.295
	JUMLAH	755.644
Jumlah Pemilih Yang Pindah Memilih (DPPH) Yang Menggunakan Hak Pilihnya	L	251
	P	228
	JUMLAH	479
Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	L	3.685
	P	4.529
	JUMLAH	8.214
Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	L	337.285
	P	427.052
	JUMLAH	764.337

Sumber : KPUD Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Tabel 10. Data Perolehan Suara

No.	Calon Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati	Jumlah
1.	H.M. AGUS SUKOCO H. EKO PRIYONO	274.437
2.	MUKTI AGUNG WIBOWO MANSUR HIDAYAT	338.905
3.	ISKANDAR ALI SYAHBANA AKHMAD AGUSWARDANA	133.818

Sumber : KPUD Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Menurut keterangan Anggota Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Harun Gunawan) “*Setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Hal-hal yang tidak diinginkan sudah diantisipasi sejak awal, dimana setiap prosesnya harus mematuhi protokol kesehatan. Sebagai penyelenggara seperti KPU, PPK, PPS, dan KPPS terlebih dahulu sudah*

melakukan Rapid Test sebagai langkah awal untuk mencegah dan memastikan bahwa penyelenggara sehat dan tidak tertular Covid-19”⁸⁵

Pada saat pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang tahun 2020, di setiap TPS menerapkan protokol kesehatan. Karena penerapan itu, pemilih atau warga Pemalang tidak mengalami kecanggungan atau kekhawatiran tertular virus Covid-19. Disediakan pula bilik khusus untuk pemilih dengan suhu diatas normal, apabila pemilih sedang melakukan isolasi akibat terkena virus Covid-19, disiapkan dua anggota KPPS untuk mendatangi tempat isolasi baik dirumah atau di rumah sakit atas persetujuan keluarga.

Keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan pilkada di tengah wabah Covid-19 di pandang sangat beresiko karena jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Banyak pihak mengkhawatirkan akan terjadi permasalahan baru berupa peningkatan kasus akibat dilaksanakannya pilkada tersebut. Terlihat pada saat pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon banyak terjadi kerumunan massa, kurangnya kesadaran masyarakat yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Ditemukannya ratusan bakal calon yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19, seperti adanya kerumunan massa akibat arak-arakan saat mendaftar ke KPU.⁸⁶

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Anggota Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Kabupaten Pemalang, hari Rabu, tanggal 30, bulan Desember, tahun 2020, jam 10.14 pagi.

⁸⁶ Nur Kholis, “Pilkada Serentak 2020: Antara Demokrasi dan Kesehatan Publik”, Pusat Penelitian Politik, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1417-pilkada-serentak-2020-antara-demokrasi-dan-kesehatan-publik>, 16 September 2020.

Masyarakat Indonesia tengah terancam dengan adanya Covid-19, dimana virus tersebut kasus positifnya semakin meningkat dan tidak kunjung menurun yang menjadi bukti bahwa pemerintah dan kesadaran masyarakat masih sangat kurang, untuk itu perlunya peran dari seluruh pihak untuk sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Peran pemerintah masih dianggap kurang dan belum maksimal dalam menangani kesehatan rakyat namun pelaksanaan kepala daerah perlu diselenggarakan. Di dalam UUD NRI 1945 mengatur tentang jaminan warga negara, bahwa kekuasaan pemerintah atau negara harus dilaksanakan dengan ketentuan yang tidak melanggar hak asasi manusia.⁸⁷

UUD NRI 1945 telah menjamin seluruh warga negara Indonesia terhadap hak asasi, terlihat dari pengaturan hak-hak dasar yang telah dicantumkan di konstitusi. Di dalam pengaturan tersebut terdapat hak-hak hukum politik, dan hak sosial ekonomi dan budaya.⁸⁸ Dijelaskan bahwa hak politik adalah dimana warga negara berhak untuk memilih serta dipilih di dalam lembaga perwakilan rakyat dengan menunjukkan kebebasan, kesetaraan, keadilan, sebagai wujud Hak Asasi Manusia (HAM).⁸⁹

⁸⁷ Wahyu Wiji Utomo, *Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid-19 dan New Normal)*, Jurnal Al-Harakah, Volume 03, Nomor 1, 2020, hlm. 34-35.

⁸⁸ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2017, hlm. 241.

⁸⁹ Hilmi Ardianto Nasution, *Memilih dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Pemilihan Umum*, Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 169.

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 sangat penting sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (6). Adanya kegiatan pilkada menjadi wujud demokrasi yaitu untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, sesuai dengan peraturan perundang-undang. Pada tahun 2020 banyak kepala daerah di Indonesia yang masa kepemimpinannya hampir habis, sementara peran dari kepala daerah sangat penting dan dibutuhkan untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat guna menangani Covid-19 dan mempercepat pemulihan pasca-Covid-19, hal itu menjadi alasan pilkada serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan. Sebenarnya pengangkatan Pelaksanaan Jabatan atau PJ dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah mengalami kekosongan, namun dinilai kurang efektif karena PJ memiliki kewenangan yang terbatas.⁹⁰

Namun di lain sisi, penyebaran virus Covid-19 semakin meningkat setiap harinya, hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dan penyelenggara Pilkada. Salah satu kebijakan pemerintah adalah diberlakukannya *new normal*, dalam hal ini dimana setiap aktivitas atau kegiatan masyarakat harus beradaptasi di tengah wabah. Bentuk dari adaptasi antara lain memakai masker, mencuci tangan, menggunakan *hand sanitizer*, menjaga jarak aman, menghindari tempat ramai untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu pelaksanaan pilkada harus memperhatikan kesehatan dan keamanan masyarakat. Tidak mungkin

⁹⁰ Nur Kholis, "Pilkada Serentak 2020.. *Op Cit.*

mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk kebaikan seluruh masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan demokrasi itu memang penting, namun kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting.⁹¹

Meskipun peraturan KPU telah memberikan teknis tahapan pelaksanaan pilkada tahun 2020 agar sesuai dengan protokol kesehatan, dengan risiko yang sangat tinggi, masih tidak dapat menjamin keselamatan warga negara. Dalam waktu yang singkat KPU dan KPUD harus telah berkoordinasi memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan, dibutuhkan fasilitas yang ekstra dan ahli di bidangnya mengingat sosialisasi akan dilakukan dari jarak jauh.⁹²

Pada Pasal 1 Ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang disebut sebagai pilkada serentak di tengah bencana non-alam Covid-19 adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota yang diselenggarakan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa perubahan pada sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, agar mengutamakan protokol

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Aryo Wasisto dan Prayudi, *Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Volume XII, Nomor 12, Hlm. 27.

kesehatan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) yaitu diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan serta berpedoman pada protokol kesehatan.

Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 Bab VIII Bagian Kesatu Pemungutan Suara Pasal 68 Ayat 1 dan 2 hal 61 mengatur Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan ketentuan antara lain,

1. Anggota KPPS dan petugas TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*).
2. Pemilih yang berada di TPS wajib menggunakan masker.
3. KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai untuk kepada pemilih untuk memilih.
4. Menjaga jarak setidaknya satu meter untuk seluruh pihak yang ada di TPS, dan terlibat dalam pemungutan suara dan penghitungan suara.
5. Tidak adanya kontak fisik seperti berjabat tangan.
6. KPPS menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir di TPS, dan sabun, serta disinfektan.

7. Wajib menggunakan alat tulis masing-masing.

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang diadakan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa Negara Indonesia tidak memiliki komitmen untuk upaya pencegahan sebagaimana dijelaskan pada pembukaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 huruf (c) bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia tidak berkomitmen untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat dan dalam pelaksanaannya perlu menghormati martabat dan hak asasi manusia. Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada Serentak 2020 artinya negara tidak berkomitmen untuk mencegah, karena apabila dilaksanakan dikhawatirkan akan menjadi klaster baru dalam penularan virus Covid-19.

Menurut Pasal 3A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bahwa tujuan dari kekarantinaan kesehatan adalah untuk melindungi masyarakat dari segala penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan. Dan dalam hal ini pemerintah dinilai melanggar hak asasi manusia seperti hak hidup, hak atas kesehatan dan hak atas aman. Sedangkan di setiap tahapan Pilkada beresiko timbulnya kerumunan massa yang akan mengakibatkan hak hak tersebut akan terancam.

Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan resiko kesehatan. Pelaksanaan Pilkada di Indonesia sendiri dilaksanakan di

tengah wabah Covid-19 yang masih meningkat, sehingga tanggung jawab pemerintah disini dipertanyakan. Pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan dengan alasan pemenuhan hak demokrasi, padahal keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih penting.

Menurut Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bahwa setiap orang yang terbukti melanggar atau tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat akan diberikan sanksi berupa pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 100.000.000. Dalam hal ini pihak yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan cara mengumpulkan banyak orang dan terjadinya kerumunan saat kampanye termasuk dalam kegiatan yang melanggar kekarantinaan karena dapat menyebabkan kedaruratan berupa menyebarluasnya virus Covid-19. Namun, dalam prakteknya di Indonesia hal ini tidak ditegakan, dimana para pelanggar hanya diberikan sanksi yang cukup ringan.

B. Dampak dari Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pematang Jaya.

Di tengah pandemi virus Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia ini. pilkada serentak tahun 2020 tetap diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, negara seharusnya bertindak untuk melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan negara yang tercantum pada pembukaan UUD NRI 1945. Dengan tetap

dilaksanakannya pilkada di tengah wabah atau pandemi ini dengan segala peraturan yang diberlakukan, kegiatan tersebut berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain⁹³ :

Pertama, dapat terlaksanakannya amanat dengan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang memiliki arti telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6, bahwa pemungutan suara pemilihan kepala daerah hasil pemilu tahun 2015 akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Namun dikarenakan pelaksanaannya di tengah pandemi Covid-19 ini pemerintah memutuskan untuk menunda pelaksanaannya dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pilkada serentak ini harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, karena peran pemerintah daerah sangat penting untuk bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah pusat.

Kedua, memenuhi hak konstitusional masyarakat dengan tetap melaksanakan kedaulatan rakyat dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah. Pilkada serentak ini adalah kegiatan untuk menyalurkan hak suara warga negara, oleh sebab itu untuk mewujudkan pelaksanaan hak-hak asasi warga negara pemerintah harus mengadakan pilkada

⁹³ Aprista Ristiyawati, *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia*, Jurnal Crepido, Volume 2, Nomor 2, November 2020, hlm. 88-89.

serentak tahun 2020. Sudah menjadi keharusan pemerintah menyelenggarakan pilkada serentak segera dilaksanakan. Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum tertuang dalam UUD NRI 1945.

Dampak positif tersebut dapat terwujud apabila dalam pelaksanaannya dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan diikuti dengan kepatuhan dari warga masyarakat itu sendiri. Selain dampak positif terdapat juga kekhawatiran dikarenakan pelaksanaannya di tengah pandemi, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain⁹⁴ :

Pertama, dapat terjadinya peningkatan kasus Covid-19 dan resiko klaster baru penularan virus Covid-19 yang sernakin luas. Pelaksanaan pilkada ini memang sangat berpotensi menimbulkan kerumunan-kerumunan orang yang mengakibatkan resiko penularan sangat tinggi. Banyak pasangan calon di berbagai daerah menggunakan arak-arakan yang menimbulkan kerumunan dan tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Saat ini di Kabupaten Pemalang terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang cukup tinggi, hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 90-91.

Tabel 11. Data Pantauan Covid-19 di Kabupaten Pemalang Bulan Juni – Desember 2020



Sumber : infocorona.pemalangkab.go.id

Berdasarkan tabel 11 diatas, menunjukan bahwa terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Pemalang sebelum dan sesudah dilaksanakannya Pilkada Serentak tahun 2020. KPU melanjutkan kegiatan atau tahapan Pilkada yang sempat tertunda mulai bulan Juni 2020 dimana tercatat ada 44 kasus positif Covid-19, kemudian ada 94 kasus pada bulan Juli 2020, dan meningkat pada bulan Agustus menjadi 163 kasus. Pada bulan September 2020 hingga Desember 2020 terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 yang sangat pesat, terlihat ada 298 kasus pada bulan September, 516 kasus pada bulan Oktober, 1200 kasus pada bulan November dan 2457 kasus pada bulan Desember.

Kedua, adanya potensi kecurangan yang rawan dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah adanya potensi adanya

politik uang yang semakin marak dilakukan karena akibat dari pandemi Covid-19 yang melemahnya perekonomian masyarakat, kemudian akan berdampak pada masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ketiga, akan berpotensi munculnya pelanggaran terutama pada tiga tahapan pilkada yaitu, seperti pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara. Dalam kegiatan rekapitulasi suara pada saat pembukaan kotak suara mengalami perubahan dengan menggunakan teknologi baru teknologi yang ditakutkan dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Keempat, penyelenggaraan pilkada memiliki potensi meningkatnya angka Golongan Putih (Golput). Keputusan pemerintah untuk tetap mengadakan pilkada di tengah pandemi ini mendapatkan protes oleh beberapa kalangan masyarakat. Dikhawatirkan apabila pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi ini akan menimbulkan masyarakat enggan untuk memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya biasanya disebut dengan Golput, karena kekhawatiran dengan kesehatan dan keamanan dirinya. Dibuktikan dengan angka partisipasi pemilih Pilkada di Kabupaten Pematang Jaya, dari jumlah pemilih 1.114.711, yang menggunakan hak suaranya hanya 764.337 pemilih, sekitar 30% pemilih Golput.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala daerah tahun 2020 diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Di dalam peraturan tersebut terdapat beberapa dalam pelaksanaannya yang disebabkan oleh adanya wabah virus Covid-19, dimana terdapat larangan berkumpulnya massa dalam jumlah yang besar. Kegiatan pilkada 2020 harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, dalam pelaksanaannya meskipun dalam peraturan KPU sudah mengatur tentang pedoman protokol kesehatan pengendalian dan pencegahan Covid-19 masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan pada kegiatan pilkada khususnya pada saat kampanye. Didalam PKPU mengatur tentang sanksi yang kurang tegas sehingga masih banyak terjadi pelanggaran, diharapkan sanksi yang diberikan membuat efek jera. Apabila pelanggaran protokol kesehatan ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, jika ada pihak yang melanggar dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan akan diberikan sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Pelaksanaan Pilkada Serentak ini juga memiliki beberapa dampak, khususnya yang terjadi di Kabupaten Pemalang. Dimana ada dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah terlaksanakannya amanat Regulasi dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6, kemudian terpenuhinya hak konstitusional masyarakat dengan tetap melaksanakan kedaulatan rakyat. Namun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini memiliki dampak negatif seperti dapat terjadinya peningkatan kasus Covid-19 dan resiko klaster baru penularan virus Covid-19 yang semakin meluas, memiliki potensi terjadinya kecurangan yang rawan dilakukan di tengah pandemi Covid-19, dapat memiliki potensi meningkatnya angka Golput karena kekhawatiran masyarakat akan tertular virus Covid-19.

B. Saran

Covid-19 menyebar dengan sangat cepat di Indonesia, mengingat virus tersebut sangat berbahaya dan kasus positif Covid-19 serta angka meninggalnya di Indonesia semakin hari semakin meningkat, saran yang akan diberikan oleh penulis adalah apabila ada pihak yang melanggar protokol kesehatan harus diberikan sanksi yang lebih tegas tidak perlu adanya sanksi peringatan tertulis untuk formalitas yang akan menghambat penyelesaian masalah pelanggaran protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdi, U Rianse, *Metodologi Sosial dan Ekonomi*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Agustino, Leo, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Aziz, Noor, M., *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Badan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Asfar, Muhammad, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya, Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo , Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Busroh , Abu Daud, 2010. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Diantha, I Made Pesek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Hook ,Sidney, dalam Nakamuru dan Samallawood, *The Politics of Policy Implementation*, st. Martin's press, New York.
- Kumolo, Tjahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose, 2015.
- Kortmann , C.A.J.M., *Constitutionalrecht, dalam Taufiqurrohman*, 2004.
- Syahuri, *Hukum Konstitusi- proses dan prosedur perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Jakarta: Ghali Indonesia.
- Montesquieu, *The Spirit of Law, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik*, M. Khoiril Anam, Penerjemah. Bandung: Nusa Media, 2007.
- Magnar, B, Kuntana Magnar, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001.

- M.D., Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud,. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,
- Mann, Richard, Penerj, Maria Irawati Yulianto, SS, *Memperjuangkan Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta: PT Enka Parihiyangan.
- Mulyosudarmo, Suwoto, *Peralihan Kekuasaan : Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, PT. Gramedia Pustaka, 1997.
- Noer , Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Nadrilun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2012.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2017.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian rakyat.
- Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, 2009.
- Prihatmoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005.
- Prayudi, *et al.*, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Penerbitan DPR RI, 2017.
- Rajabi, Achmadudin, *Analisis Kekurangan Perpu No. 2 Tahun 2020 Dari Sisi UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 15 Tahun 2019*, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2020.
- Ridwan, H.R., *Hukum Admnistrasi Negara*, Yogyakarta : UII-Press, 2002.
- Sarwono,J., *Pintar Menulis Karangan Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Strong, C. F., *Modern Political Constitution: An Introduction to the Competitive Study of Their History and Existing From*, SPA

Teamwork, *Konstitusi Politik Modern*, Bandung : Nuansa dan Media, 2004.

Suny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif : Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tatanegara*, Jakarta : Aksara Baru.

Sorensen, G., *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sudarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004*, Oleh Mahkamah Konstitusi, 2005.

Thaib, Dahlan, *et al.*, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Wheare K.C., *Modern Constitutions*, London-New York-Toronto: Oxford University.

Wijayanti, Septi Nur, dan Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009.

Artikel Ilmiah / Jurnal, Skripsi dan Disertasi

Amanwinata, Rukmana, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, Bandung: Disertasi Universitas Padjajaran.

Fauzi, Irham, *Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada*, Yogyakarta, Paper present at Jurusan Teknik Informatika STIMIK Amikom, 2011.

Hergianasar, Putri, *Electoral Distancing: Alternati Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume1, Nomor 1, 2020.

Jamaludin, Teten, *Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika*, dalam Jurnal Politik Walisongo, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, dalam Jurnal Hukum, Nomor 3, Volume 16, 2009.

Marzuki, Suparman, *Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokratis*, di dalam Jurnal Hukum, Volume 15, Nomor 3, 2008.

- Noviawati, Evi, *Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, di dalam Jurnal Online Universitas Galuh, Volume 7, Nomor 1, 2019.
- Nasution, Latipah, *Pemilu dan Kedaulatan Rakyat*, Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1, Nomor 9B, 2017.
- Nasution, Hilmi Ardianto, *Memilih dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontensasi Pemilihan Umum*, Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 2, 2019.
- Purnamawati, Evi, *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*, di dalam Jurnal Universitas Palembang, Volume 18, Nomor 2, 2020.
- Pramusinto, Agus, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004*, Jurnal Analisis CSIS Volume 33, Nomor 2, 2004.
- Riyanti, Ratna, *Pemilihan Umum Anggota DPRD di Jawa Tengah Berbasis Keadilan Gender Tahun 2014*, dalam Disertasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Ristyawati, Aprista, *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia*, Jurnal Crepido, Volume 2, Nomor 2, 2020.
- Suyatno, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Uni/versitas Negeri Yogyakarta.
- Simamora, Janpatar, *Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis*, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, 2011.
- Susilawan, Muhammad Andi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, dalam jurnal Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 2, 2014.
- Simanjuntak, Josner, *Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, 2016.
- Sugiharto, Imawan, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif*, Disertasi Universitas Islam Sultan Agung, 2016.

Supriyadi, *Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 22, Nomor 3, 2020.

Telaumbanua, Dalinama, *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Volume 12, 2020.

Umar, Hasbi, *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPD*, Jurnal Innovatio, Volume VII, Nomor 14, 2008.

Utomo, Wahyu Wiji, *Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid-19 dan New Normal)*, Jurnal Al-Harakah, Volume 03, Nomor 1, 2020.

Widianingsih, Yuliani, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati, 2017.

Wasisto Aryo dan Prayudi, *Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Volume XII, Nomor 12, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Republik Indonesia Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Surat Kabar dan Artikel

Ari Welianto (ed) , *Sistem Presidensial, Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 4 September, 2020.
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/02/05/160000869/sistem-presidensial-sistem-pemerintah-di-indonesia>

Bivitri Susanti,S.H.,LL.M, *Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Haruskah Tetap Dilaksanakan?* Jakarta, 1 Juli, 2020,
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5efc763f109f2/pilkada-si-tengah-pandemi-covid-19-haruskah-tetap-dilaksanakan-/>

Eko Sulisty, *Pilkada di Tengah Pandemi*, Berita Satu, Jakarta, 15 Juni, 2020.
<https://www.beritasatu.com/archive/opini/6923/pilkada-di-tengah-pandemi>.

Fitang Budhi Aditya, “Izin Konser Dihapus, Ini 7 Aturan Baru PKPU Saat Kampanye Pilkada”, IDN Times, September 2020,
<https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/news/indonesia/amp/fitang-adhitia/izin-konser-dihapus-ini-7-aturan-baru-pkpu-saat-kampanye-pilkada>.

Nur Kholis, “Pilkada Serentak 2020: Antara Demokrasi dan Kesehatan Publik”, Pusat Penelitian Politik, 16 September 2020.
<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1417-pilkada-serentak-2020-antara-demokrasi-dan-kesehatan-publik>.

Serafica Gischa (ed), *Pemilihan Umum Sebagai Wujud Demokrasi Pancasila*, Kompas, Jakarta, 4 September, 2020.
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/09/04/133046169/pemilihan-umum-sebagai-wujud-demokrasi-pancasila>

Toar Palilingan, *Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah Covid-19*, Manadopost.id, April, 2020.

<https://www.google.com/amp/s/manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-penanganan-wabah-covid-19/amp/>,

Topan Yuniarto, “Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia”, Kompaspedia, 7 Desember 2020.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia>

Yulida Medistira, Maret 2020, *UU Kekarantinaan Kesehatan Dinilai Sudah Bisa Diterapkan Pemerintah*, detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-4954336/uu-kekarantinaan-kesehatan-dinilai-sudah-bisa-diterapkan-pemerintah>,

infocorona.pemalangkab.go.id

Wawancara

Wawancara dengan Anggota/Koordinator Divisi Pengawasan BAWASLU Kabupaten Pemalang, hari Jumat, tanggal 11, bulan Desember, tahun 2020, jam 10.17 pagi.

Wawancara dengan Anggota Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Kabupaten Pemalang, hari Rabu, tanggal 30, bulan Desember, tahun 2020, jam 10.14 pagi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rosiska Chaerunisa Herbani

NPM : 5117500052

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 17 Oktober 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Griya Santika Blok O No. 53 RT 06 RW 03
Pengabean, Dukuhturi, Kabupaten Tegal.

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Bandung 1 Tegal	2005	2011
2	SMP Negeri 7 Tegal	2011	2014
3	SMA Negeri 4 Tegal	2014	2017
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2017	

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 28 Januari 2021

Hormat Saya,

Rosiska Chaerunisa Herbani

LAMPIRAN

KEGIATAN WAWANCARA DI BAWASLU DAN KPUD KABUPATEN PEMALANG



DRAFT WAWANCARA

Lokasi, Identitas, dan Waktu			
Kab/Kota	Pemalang	Nama Informan	Harun Gunawan
Kecamatan	Pemalang	Status Informan	Divisi Teknik Penyelenggara KPUB Kab. Pemalang
Nama Instansi	KPUD Kabupaten Pemalang	Tgl/Jam	30 Desember 2020 Jam. 10.14 Pagi
Nama Peneliti	Rosiska Chaerunisa Herbani		

- Apakah pada pelaksanaan pilkada kemarin sudah sesuai dengan protokol kesehatan?
Setiap tahapan pilkada sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dg PKPU No. 13 th 2020. Penyelenggara Pilkada terlebih dahulu melakukan Rapid test sebagai langkah awal untuk mencegah.
- Pada saat persiapan pilkada tahun 2020 mulai dari pencalonan, kampanye dan pemungutan suara kemarin apakah terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Pemalang?
Memang terjadi lonjakan, namun tidak ditemukan adanya klaster baru akibat pilkada.
- Pada saat kampanye ada peraturan yang membatasi orang dan ketentuan mengenai protokol kesehatan, apakah di Kabupaten Pemalang ada pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan?
ada pasangan yang terbukti melanggar protokol kesehatan yang kemudian diberikan sanksi sesuai PKPU No. 13 th 2020.
- Apa jenis sanksi yang digunakan apabila terbukti melanggar?
Sanksi surat peringatan, sanksi pemberhentian & pembubaran, serta sanksi larangan untuk berkampanye selama 3 hari. Mungkin jika ada unsur pidana akan dikenakan sanksi Undang-Undang kesehatan.

5. Pilkada yang dilaksanakan ditengah pandemi menimbulkan kekhawatiran dan pemilih takut untuk memilih, apakah terjadi penurunan jumlah pemilih dari pilkada sebelumnya?

di setiap TP& menerapkan protokol kesehatan, karena penerapan itu pemilih / warga Pemalang tidak mengalami kecanggungan atau kekhawatiran tertular. Tidak mengalami penurunan yg signifikan dari tahun sebelumnya.

DRAFT WAWANCARA

Lokasi, Identitas, dan Waktu			
Kab/Kota	Pemalang	Nama Informan	Abdul Malsus
Kecamatan	Pemalang	Status Informan	Divisi Pengawasan Bawaslu Kab. Pemalang
Nama Instansi	Bawaslu Kabupaten Pemalang	Tgl/Jam	11 Desember 2020 jam 16.17 Pagi
Nama Peneliti	Rosiska Chaerunisa Herbani		


1. Apakah pada pelaksanaan pilkada kemarin sudah sesuai dengan protokol kesehatan?
Sudah menyesuaikan aturan protokol kesehatan, dimana di TPS disediakan sarana Sanitasi berupa tempat cuci tangan dan handsanitizer.
2. Apa ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi di pilkada serentak tahun ini? Seperti politik uang, pelanggaran kampanye, atau pelanggaran protokol kesehatan.
Ada beberapa dugaan politik uang yang dilaporkan, saat ini sedang di Periksa Para Saksinya. Untuk pelanggaran protokol kesehatan ada ditemukan kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan dan tidak menggunakan masker.
3. Dalam hal mengawasi apakah pengawasan juga dilakukan secara online/
Apabila sedang mengadakan rapat pleno tingkat Kabupaten Pemalang dilakukan secara tatap muka dg tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila mengadakan rapat dg Pusat menggunakan online.
4. Apa ada pelanggaran yang sampai ke pengadilan? Bagaimana penyelesaiannya.
di Kab. pemalang tidak ada yang sampai ke pengadilan.

5. Apakah ada TPS di Kabupaten Pemalang yang berpotensi dilakukannya pemungutan suara ulang?

Tidak ada TPS yang berpotensi dilakukannya pemungutan suara ulang.

- ② • Jumlah Pencegahan 307 (secara langsung & lisan)
- Jumlah Surat himbuan (ikut dalam Pencegahan) 296
 - Jumlah Saran Perbaikan (apabila tidak dilaksanakan masuk ke Penanganan Pelanggaran) 131
 - Jumlah Peringatan tertulis pelanggaran proses 8
 - Jumlah Kampanye tatap muka yg diawasi 581
 - Jumlah Kampanye tanpa STTPK (masuk ke pelanggaran & dibubarkan) 5
STTP = Surat tanda terima Pemberitahuan Kampanye ke Kepolisian
 - Jumlah Kegiatan lainnya yg diawasi (Kegiatan yg dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, atau organisasi yg berpotensi untuk dijadikan kampanye) 218

REKAP PENCEGAHAN DAN KEGIATAN KAMPANYE/LAINNYA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG

REKAP FORM A, PENCEGAHAN DAN KEGIATAN KAMPANYE/LAINNYA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

NO	KABUPATEN	JUMLAH FORM A HASIL PENGAWASAN				PENCEGAHAN			SURAT PERINGATAN TERTULIS	JUMLAH KAMPANYE
		JUMLAH FORM A (PKD)	JUMLAH FORM A (PANWASCAM)	JUMLAH FORM A (BAWASLU)	JUMLAH	JUMLAH PENCEGAHAN (SEMUA TAHAPAN)	JUMLAH SURAT IMBAUAN (SEMUA TAHAPAN)	JUMLAH SARAN PERBAIKAN (SEMUA TAHAPAN)		TOTAL
1	PEMALANG	5.623	1.702	105	7.430	397	296	131	8	581

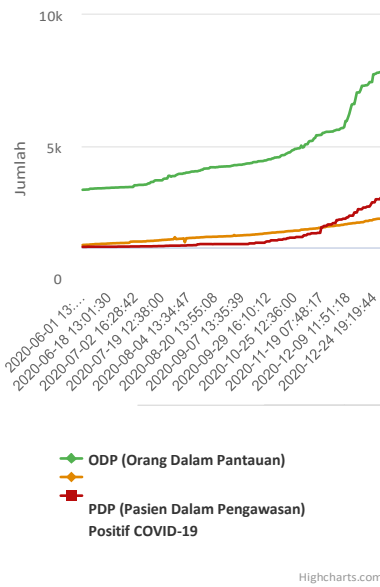
PENERTIBAN APK	FORM A NAIK MENJADI TEMUAN
11.869	4

JUMLAH KAMPANYE TANPA STTP
TOTAL
5

JUMLAH KEGIATAN LAIN
218

DATA KASUS COVID-19 BULAN JUNI-DESEMBER TAHUN 2020 DI KABUPATEN PEMALANG

ICor Pemalang



No	Tanggal	Jumlah Kasus ODP			Jumlah Kasus PDP				Jumlah Kasus COVID			
		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
1	2020-12-30 12:58:28	706	7952	8658	205	1184	40	1429	499	1810	148	2457
2	2020-12-29 13:48:30	917	7741	8658	197	1179	40	1416	499	1810	148	2457
3	2020-12-29 12:50:39	917	7741	8658	197	1179	40	1416	636	1608	136	2380
4	2020-12-28 19:20:04	898	7736	8634	212	1167	40	1419	636	1608	136	2380
5	2020-12-27 13:04:53	972	7660	8632	247	1128	39	1414	636	1608	136	2380
6	2020-12-26 08:28:02	1145	7440	8585	233	1128	39	1400	636	1608	136	2380

7	2020- 12-24 19:19:44	1352	7216	8568	223	1120	39	1382	545	1553	132	2230
8	2020- 12-23 14:30:31	1482	7072	8554	217	1120	39	1376	545	1553	132	2230
9	2020- 12-23 09:27:44	1446	6724	8170	191	1105	39	1335	545	1553	132	2230

ICor Pemalang

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
10	2020- 12-22 07:22:17	1446	6724	8170	191	1105	39	1335	552	1430	130	2112
11	2020- 12-21 12:39:57	1446	6724	8170	191	1105	39	1335	521	1373	125	2019
12	2020- 12-20 12:45:45	1507	6552	8059	198	1072	38	1308	521	1373	125	2019
13	2020- 12-20 06:50:49	1604	6407	8011	195	1072	37	1304	521	1373	125	2019
14	2020- 12-19 13:45:49	1604	6407	8011	195	1072	37	1304	521	1324	124	1969
15	2020- 12-18 14:40:06	1606	6390	7996	181	1060	36	1277	521	1324	124	1969
16	2020- 12-18 07:36:50	1611	6373	7984	172	1041	36	1249	521	1324	124	1969
17	2020- 12-17 13:03:16	1611	6373	7984	172	1041	36	1249	442	1318	122	1882
18	2020- 12-16 14:15:42	1434	6347	7781	165	1041	36	1242	442	1318	122	1882
19	2020- 12-15 17:07:43	1379	6281	7660	147	1041	36	1224	442	1318	122	1882
20	2020- 12-15 17:00:55	1379	6281	7660	147	1041	36	1224	452	1318	122	1892
21	2020- 12-15 12:29:51	1379	6281	7660	147	1041	36	1224	346	1267	114	1727
22	2020- 12-14 13:22:54	1136	6221	7357	131	1041	36	1208	346	1267	114	1727
23	2020- 12-14 08:22:35	920	6161	7081	148	1013	36	1197	346	1267	114	1727

ICor Pemalang

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
24	2020- 12-13 12:26:46	920	6161	7081	148	1013	36	1197	263	1200	107	1570
25	2020- 12-12 12:40:23	963	6101	7064	138	1013	36	1187	263	1200	107	1570
26	2020- 12-11 12:49:40	778	6042	6820	129	1013	36	1178	263	1200	107	1570
27	2020- 12-10 15:18:43	668	5928	6596	123	1013	36	1172	263	1200	107	1570
28	2020- 12-09 11:51:18	534	5890	6424	126	1002	36	1164	255	1127	103	1485
29	2020- 12-08 08:29:19	428	5818	6246	120	989	36	1145	255	1127	103	1485
30	2020- 12-07 12:16:57	428	5818	6246	120	989	36	1145	257	1060	99	1416
31	2020- 12-05 17:20:54	173	5781	5954	107	989	36	1132	257	1060	99	1416
32	2020- 12-05 07:04:41	140	5756	5896	103	978	36	1117	257	1060	99	1416
33	2020- 12-04 13:57:11	140	5756	5896	103	978	36	1117	289	998	94	1381
34	2020- 12-03 12:26:45	195	5675	5870	96	969	36	1101	289	998	94	1381
35	2020- 12-03 08:38:33	191	5621	5812	81	969	36	1086	289	998	94	1381
36	2020- 12-02 09:35:02	191	5621	5812	81	969	36	1086	283	973	94	1350
37	2020- 12-02 09:32:39	191	5621	5812	81	969	36	1086	283	974	94	1351

ICor Pemalang

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
38	2020-12-01 16:49:37	175	5614	5789	80	958	36	1074	176	947	77	1200
39	2020-11-29 12:22:12	189	5575	5764	100	926	36	1062	176	947	77	1200
40	2020-11-28 08:44:28	269	5459	5728	92	926	36	1054	176	947	77	1200
41	2020-11-27 14:06:14	269	5459	5728	92	926	36	1054	183	879	71	1133
42	2020-11-26 13:08:14	289	5432	5721	104	911	36	1051	183	879	71	1133
43	2020-11-25 12:56:07	311	5405	5716	107	902	36	1045	183	879	71	1133
44	2020-11-24 15:33:53	333	5378	5711	112	889	36	1037	183	879	71	1133
45	2020-11-24 12:26:19	333	5378	5711	112	889	36	1037	392	597	71	1060
46	2020-11-22 14:42:46	437	5259	5696	94	874	35	1003	392	597	71	1060
47	2020-11-21 21:26:50	402	5259	5661	87	874	35	996	392	597	71	1060
48	2020-11-21 16:11:09	402	5259	5661	83	874	35	992	381	554	64	999
49	2020-11-19 07:48:17	334	5229	5563	92	848	35	975	381	554	64	999
50	2020-11-18 12:01:47	380	5176	5556	84	848	35	967	143	521	57	721
51	2020-11-17 12:32:12	454	5097	5551	91	841	35	967	143	521	57	721

ICor Pemalang

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
52	2020-11-16 10:26:52	500	5041	5541	70	835	35	940	143	521	57	721
53	2020-11-15 15:38:04	500	5041	5541	70	835	35	940	153	492	53	698
54	2020-11-13 13:55:14	370	5041	5411	63	833	35	931	153	492	53	698
55	2020-11-12 13:04:04	343	5041	5384	76	818	35	929	153	492	53	698
56	2020-11-11 12:51:50	238	5032	5270	69	818	35	922	153	492	53	698
57	2020-11-10 08:14:49	268	4988	5256	75	809	35	919	153	492	53	698
58	2020-11-09 14:48:56	268	4988	5256	72	809	35	916	139	472	51	662
59	2020-11-08 14:23:17	243	4988	5231	66	801	35	902	139	472	51	662
60	2020-11-05 20:31:26	169	4934	5103	65	792	35	892	139	472	51	662
61	2020-11-05 19:04:56	169	4934	5103	65	792	35	892	89	462	48	599
62	2020-11-04 20:14:21	187	4893	5080	68	789	35	892	89	462	48	599
63	2020-11-03 07:27:09	130	4823	4953	71	778	34	883	89	462	48	599
64	2020-11-02 14:39:46	113	4823	4936	64	778	34	876	67	406	43	516
65	2020-11-02 14:35:09	115	4922	5037	64	778	34	876	67	406	43	516

ICor Pemalang

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
66	2020-10-30 13:29:43	207	4699	4906	57	752	34	843	67	406	43	516
67	2020-10-28 12:08:59	236	4661	4897	49	752	33	834	67	406	43	516
68	2020-10-26 13:46:25	262	4629	4891	45	752	33	830	67	406	43	516
69	2020-10-26 07:42:24	243	4629	4872	50	747	33	830	67	406	43	516
70	2020-10-25 12:36:00	243	4629	4872	50	747	33	830	60	381	40	481
71	2020-10-23 14:17:42	260	4558	4818	52	738	33	823	60	381	40	481
72	2020-10-22 08:32:10	258	4545	4803	48	729	33	810	60	381	40	481
73	2020-10-20 13:07:07	248	4506	4754	52	726	32	810	60	381	40	481
74	2020-10-20 07:57:35	187	4504	4691	57	715	32	804	60	381	40	481
75	2020-10-18 13:25:40	187	4504	4691	57	715	32	804	58	359	40	457
76	2020-10-17 10:12:16	197	4458	4655	58	709	32	799	58	359	40	457
77	2020-10-16 18:06:43	172	4455	4627	53	709	32	794	85	295	36	416
78	2020-10-14 12:27:50	168	4407	4575	46	697	32	775	85	295	36	416
79	2020-10-13 07:52:53	166	4394	4560	43	688	32	763	85	295	36	416

ICor Pemalang

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
80	2020-10-12 12:47:09	166	4394	4560	43	688	32	763	66	279	35	380
81	2020-10-10 14:02:36	185	4346	4531	45	681	32	758	66	279	35	380
82	2020-10-09 14:04:38	125	4343	4468	45	681	32	758	66	279	35	380
83	2020-10-09 08:59:52	136	4322	4458	49	669	32	750	66	279	35	380
84	2020-10-08 14:11:20	136	4322	4458	49	669	32	750	52	268	28	348
85	2020-10-07 19:29:19	151	4290	4441	47	662	31	740	52	268	28	348
86	2020-10-06 20:29:45	157	4282	4439	40	662	31	733	52	268	28	348
87	2020-10-05 13:28:45	168	4232	4400	45	655	31	731	52	268	28	348
88	2020-10-03 13:05:31	174	4224	4398	51	649	31	731	52	268	28	348
89	2020-10-02 06:39:53	170	4189	4359	43	645	31	719	52	268	28	348
90	2020-09-30 15:38:36	172	4185	4357	34	645	31	710	18	257	23	298
91	2020-09-29 16:10:12	165	4182	4347	35	640	31	706	18	257	23	298
92	2020-09-28 08:04:13	164	4161	4325	49	617	31	697	18	257	23	298
93	2020-09-23 17:09:56	165	4131	4296	49	612	30	691	17	239	21	277

ICor Pemalang

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
94	2020-09-23 14:54:19	165	4131	4296	49	612	30	691	21	189	19	229
95	2020-09-22 13:26:44	162	4107	4269	42	609	30	681	21	189	19	229
96	2020-09-21 15:20:35	156	4107	4263	42	595	30	667	21	189	19	229
97	2020-09-20 13:11:33	156	4107	4263	42	591	30	663	21	189	19	229
98	2020-09-19 12:41:18	156	4101	4257	38	591	30	659	21	189	19	229
99	2020-09-18 13:14:47	167	4089	4256	34	587	30	651	21	189	19	229
100	2020-09-17 15:44:13	139	4086	4225	29	587	28	644	21	189	19	229
101	2020-09-17 07:43:38	132	4083	4215	29	587	28	644	21	189	19	229
102	2020-09-16 14:42:50	132	4083	4215	25	582	28	635	13	172	16	201
103	2020-09-15 17:08:46	148	4064	4212	28	579	28	635	13	172	16	201
104	2020-09-14 13:01:22	127	4043	4170	22	579	28	629	13	172	16	201
105	2020-09-13 17:43:35	127	4038	4165	21	573	28	622	13	172	16	201
106	2020-09-13 07:05:07	114	4038	4152	17	570	28	615	13	172	16	201
107	2020-09-12 12:37:55	114	4038	4152	17	570	28	615	14	138	11	163

ICor Pemalang

			Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
108	2020-09-11 13:42:12	110		4033	4143	19	568	27	614	14	138	11	163
109	2020-09-10 13:08:40	102		4031	4133	19	562	27	608	14	138	11	163
110	2020-09-09 12:48:46	90		4022	4112	15	562	27	604	14	138	11	163
111	2020-09-08 13:01:13	86		4022	4108	12	561	27	600	14	138	11	163
112	2020-09-07 13:35:39	76		4008	4084	15	552	27	594	14	138	11	163
113	2020-09-06 13:03:06	79		4005	4084	13	552	27	592	14	138	11	163
114	2020-09-05 12:41:33	79		4005	4084	17	545	27	589	14	138	11	163
115	2020-09-04 13:21:25	73		4005	4078	16	541	27	584	14	138	11	163
116	2020-09-03 14:17:36	60		4005	4065	14	538	27	579	14	138	11	163
117	2020-09-02 12:57:17	84		3979	4063	17	528	27	572	14	138	11	163
118	2020-09-02 12:54:39	84		3979	4063	17	572	27	616	14	138	11	163
119	2020-09-01 13:10:53	86		3958	4044	16	523	27	566	14	138	11	163
120	2020-08-31 13:10:06	76		3955	4031	15	521	27	563	14	138	11	163
121	2020-08-29 12:13:18	59		3955	4014	13	516	27	556	14	138	11	163

ICor Pemalang

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
122	2020-08-28 12:59:46	55	3955	4010	12	516	27	555	14	138	11	163
123	2020-08-28 07:51:49	54	3954	4008	11	516	27	554	14	138	11	163
124	2020-08-27 12:09:30	54	3954	4008	11	516	27	554	21	131	11	163
125	2020-08-26 12:26:52	51	3952	4003	17	506	27	550	21	131	11	163
126	2020-08-25 13:52:55	67	3931	3998	24	497	27	548	21	131	11	163
127	2020-08-25 08:24:52	71	3923	3994	19	497	27	543	21	131	11	163
128	2020-08-24 14:51:30	71	3923	3994	19	497	27	543	45	107	11	163
129	2020-08-23 17:52:14	81	3905	3986	30	487	26	543	45	107	11	163
130	2020-08-22 15:30:11	82	3903	3985	28	487	26	541	45	107	11	163
131	2020-08-21 13:17:14	83	3887	3970	23	487	26	536	45	107	11	163
132	2020-08-20 13:57:34	87	3880	3967	17	485	26	528	45	107	11	163
133	2020-08-20 13:55:08	77	3880	3957	17	485	26	528	45	107	11	163
134	2020-08-19 18:19:05	95	3869	3964	15	484	26	525	45	107	11	163
135	2020-08-19 13:09:36	95	3869	3964	15	484	26	525	45	103	11	159

ICor Pemalang

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
136	2020-08-19 08:19:09	92	3867	3959	14	484	26	524	45	107	11	163
137	2020-08-18 13:40:41	92	3867	3959	14	484	26	524	75	77	11	163
138	2020-08-17 13:01:26	44	3862	3906	21	475	26	522	75	77	11	163
139	2020-08-16 12:10:48	41	3862	3903	27	469	26	522	75	77	11	163
140	2020-08-15 13:10:22	41	3862	3903	25	469	26	520	75	77	11	163
141	2020-08-14 13:32:23	69	3829	3898	21	467	26	514	75	77	11	163
142	2020-08-13 13:36:03	83	3814	3897	22	462	26	510	75	77	11	163
143	2020-08-13 07:35:58	35	3803	3838	23	455	26	504	75	77	11	163
144	2020-08-12 13:15:03	35	3803	3838	23	455	26	504	91	61	11	163
145	2020-08-11 13:14:41	40	3755	3795	16	455	26	497	91	61	11	163
146	2020-08-10 12:47:36	72	3718	3790	16	444	26	486	77	61	11	149
147	2020-08-09 14:38:07	124	3640	3764	16	444	26	486	77	61	11	149
148	2020-08-09 12:17:31	124	3640	3764	16	444	26	486	42	61	10	113
149	2020-08-08 12:54:02	123	3640	3763	19	432	26	477	42	61	10	113

ICor Pemalang

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
150	2020-08-07 17:34:09	143	3604	3747	14	432	26	472	42	61	10	113
151	2020-08-07 12:52:42	143	3604	3747	14	432	26	472	43	53	7	103
152	2020-08-06 12:15:53	162	3580	3742	16	426	26	468	43	53	7	103
153	2020-08-05 12:51:21	225	3490	3715	15	426	26	467	43	53	7	103
154	2020-08-04 13:34:47	221	3483	3704	13	420	26	459	43	53	7	103
155	2020-08-03 20:32:39	236	3463	3699	26	405	25	456	43	53	7	103
156	2020-08-03 14:07:29	236	3463	3699	26	405	25	456	38	51	5	94
157	2020-08-02 12:29:50	231	3432	3663	24	205	25	254	38	51	5	94
158	2020-08-01 12:33:57	264	3399	3663	19	402	25	446	38	51	5	94
159	2020-07-31 12:47:47	242	3398	3640	24	387	25	436	38	51	5	94
160	2020-07-30 20:57:26	254	3386	3640	20	387	25	432	38	51	5	94
161	2020-07-30 14:58:33	254	3386	3640	20	387	25	432	38	45	4	87
162	2020-07-29 13:18:19	245	3386	3631	16	383	25	424	38	45	4	87
163	2020-07-28 15:09:35	231	3375	3606	11	383	25	419	38	45	4	87

ICor Pemalang

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
164	2020-07-27 13:20:39	260	3309	3569	13	373	24	410	38	45	4	87
165	2020-07-26 12:49:16	226	3303	3529	18	467	24	509	38	45	4	87
166	2020-07-25 14:49:00	297	3232	3529	20	360	23	403	38	45	4	87
167	2020-07-25 13:31:04	297	3232	3529	20	360	23	403	40	40	3	83
168	2020-07-24 12:54:29	266	3227	3493	15	360	23	398	40	40	3	83
169	2020-07-23 21:31:04	269	3273	3542	18	346	23	387	40	40	3	83
170	2020-07-23 13:40:48	269	3273	3542	18	346	23	387	35	39	3	77
171	2020-07-22 14:08:16	240	3166	3406	17	341	23	381	35	39	3	77
172	2020-07-21 21:08:52	271	3128	3399	12	341	23	376	35	39	3	77
173	2020-07-21 14:25:23	271	3128	3399	12	341	23	376	31	39	3	73
174	2020-07-20 15:06:41	252	3128	3380	14	335	23	372	26	38	3	67
175	2020-07-19 12:38:00	190	3127	3317	15	330	23	368	26	38	3	67
176	2020-07-18 12:37:35	195	3122	3317	22	314	23	359	26	38	3	67
177	2020-07-17 13:21:14	212	3102	3314	19	314	23	356	26	38	3	67

ICor Pemalang

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
178	2020-07-16 16:51:55	213	3100	3313	13	308	22	343	26	38	3	67
179	2020-07-16 13:10:19	213	3100	3313	13	308	22	343	21	35	3	59
180	2020-07-15 13:25:05	300	3013	3313	9	306	22	337	21	35	3	59
181	2020-07-14 12:46:21	291	3012	3303	13	300	22	335	21	35	3	59
182	2020-07-13 20:32:47	227	3010	3237	12	292	22	326	21	35	3	59
183	2020-07-13 12:52:45	227	3010	3237	12	292	22	326	19	33	3	55
184	2020-07-12 12:37:12	227	3005	3232	17	288	21	326	19	33	3	55
185	2020-07-11 12:40:46	168	2997	3165	14	280	21	315	19	33	3	55
186	2020-07-10 12:54:45	170	2992	3162	16	278	21	315	19	33	3	55
187	2020-07-09 13:27:39	140	2986	3126	20	274	21	315	19	33	3	55
188	2020-07-08 20:56:21	131	2976	3107	13	265	21	299	19	33	3	55
189	2020-07-08 14:39:54	131	2976	3107	13	265	21	299	15	33	3	51
190	2020-07-07 12:48:25	121	2969	3090	8	265	21	294	15	33	3	51
191	2020-07-06 12:50:25	128	2962	3090	6	265	20	291	15	33	3	51

ICor Pemalang

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
192	2020-07-05 22:06:04	130	2959	3089	7	263	20	290	15	33	3	51
193	2020-07-05 13:40:22	130	2959	3089	7	263	20	290	12	31	3	46
194	2020-07-04 13:16:03	130	2955	3085	11	259	20	290	12	31	3	46
195	2020-07-03 12:48:26	120	2948	3068	10	259	20	289	12	31	3	46
196	2020-07-02 16:28:42	125	2943	3068	15	254	20	289	12	31	3	46
197	2020-07-02 14:31:44	125	2943	3068	15	254	20	289	12	30	2	44
198	2020-07-01 15:14:09	46	2938	2984	22	247	20	289	12	30	2	44
199	2020-06-30 16:25:19	51	2933	2984	20	244	20	284	12	30	2	44
200	2020-06-30 16:12:38	51	2933	2984	20	244	20	284	11	31	2	44
201	2020-06-29 13:24:04	56	2927	2983	13	199	19	231	9	30	1	40
202	2020-06-28 12:31:45	56	2925	2981	12	194	18	224	9	30	1	40
203	2020-06-27 15:17:22	62	2917	2979	24	181	18	223	9	30	1	40
204	2020-06-27 12:44:55	62	2917	2979	26	179	18	223	8	28	1	37
205	2020-06-26 14:47:07	60	2915	2975	23	179	18	220	8	28	1	37

ICor Pemalang

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
206	2020-06-26 14:34:20	56	2915	2971	23	179	18	220	8	28	1	37
207	2020-06-26 14:27:02	56	2915	2971	22	179	18	219	8	28	1	37
208	2020-06-25 12:54:42	65	2909	2974	22	179	18	219	8	28	1	37
209	2020-06-24 12:37:49	75	2894	2969	20	176	18	214	8	28	1	37
210	2020-06-23 20:50:15	71	2890	2961	17	176	18	211	8	28	1	37
211	2020-06-23 13:16:22	71	2890	2961	17	176	18	211	7	27	1	35
212	2020-06-22 13:12:35	70	2886	2956	23	168	17	208	7	27	1	35
213	2020-06-21 12:25:35	68	2886	2954	20	168	17	205	7	27	1	35
214	2020-06-20 20:46:57	77	2875	2952	20	168	17	205	7	27	1	35
215	2020-06-20 13:23:33	77	2875	2952	17	167	17	201	5	27	1	33
216	2020-06-19 14:59:10	81	2867	2948	15	167	17	199	5	27	1	33
217	2020-06-18 13:01:30	81	2860	2941	19	158	17	194	5	27	1	33
218	2020-06-17 12:38:01	84	2856	2940	15	158	17	190	5	27	1	33
219	2020-06-16 12:51:12	85	2852	2937	13	158	16	187	5	27	1	33

ICor Pemalang

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
220	2020-06-15 15:02:15	87	2847	2934	19	145	16	180	5	27	1	33
221	2020-06-14 13:08:11	89	2839	2928	17	145	16	178	5	27	1	33
222	2020-06-13 12:41:03	109	2814	2923	17	143	16	176	5	27	1	33
223	2020-06-13 12:37:53	108	2814	2922	17	143	16	176	5	27	1	33
224	2020-06-12 13:03:25	151	2768	2919	15	143	16	174	5	27	1	33
225	2020-06-11 14:22:00	157	2761	2918	15	137	16	168	5	27	1	33
226	2020-06-11 13:07:41	157	2761	2918	15	137	15	167	5	27	1	33
227	2020-06-10 20:55:33	176	2736	2912	11	137	15	163	5	27	1	33
228	2020-06-10 12:57:47	176	2736	2912	23	127	13	163	6	25	1	32
229	2020-06-09 12:36:47	168	2736	2904	15	127	13	155	6	25	1	32
230	2020-06-08 13:05:14	174	2727	2901	10	127	13	150	6	25	1	32
231	2020-06-07 12:17:36	170	2727	2897	12	120	13	145	6	25	1	32
232	2020-06-06 12:47:50	178	2719	2897	11	120	13	144	6	25	1	32
233	2020-06-05 13:29:42	149	2716	2865	6	114	13	133	6	25	1	32

		Pemantauan	Selesai	Kumulatif	Pengawasan	Selesai	Meninggal	Kumulatif	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Kom
234	2020-06-04 20:25:58	147	2712	2859	6	114	13	133	6	25	1	32
235	2020-06-04 14:23:13	147	2712	2859	6	111	13	130	4	25	1	30
236	2020-06-03 15:09:59	203	2649	2852	10	106	13	129	3	25	1	29
237	2020-06-02 21:56:56	209	2642	2851	8	106	13	127	3	25	1	29
238	2020-06-01 13:30:36	217	2631	2848	3	104	13	120	3	25	1	29

PAGE